

BAB III

TAKTIK RESTORATIF

Dari tahun 1980 hingga 2000 lebih dari 70.000 orang di Peru telah dihilangkan atau dibunuh. Kebanyakan dari para korban berasal dari keluarga desa miskin, yang sebagian besar terkesampingkan dari kehidupan ekonomi dan politik. Komunitas HAM di Peru membawa isu ini menjadi perhatian dari media, publik pada umumnya dan organisasi-organisasi internasional, mengarah pada pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk berkempatan mengabdikan diri pada Komisi ini.

Komisi Kebenaran ini, yang mengeluarkan laporan finalnya pada bulan Agustus 2003, membuat negara tak mungkin lagi mengabaikan jeritan keadilan dari keluarga-keluarga orang-orang yang telah dihilangkan. Kerja-kerja Komisi ini, yang merupakan kemenangan bagi hak asasi manusia, hanyalah langkah pertama dari proses yang lebih besar untuk memulihkan hak dan keadilan bagi semua orang di Peru.

Dalam Bab ini Anda akan menyimak mengenai pengalaman orang dan organisasi lainnya yang berpartisipasi dalam organisasi seperti Komisi Kebenaran, yang merupakan bagian dari proses menegakkan keadilan dan memulihkan kembali komunitas-komunitas pasca pelanggaran HAM yang masif. Sejumlah pihak yang telah mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran tersebut, membuat negara atau masyarakat tidak dapat lagi mengabaikannya. Beberapa pihak lain berkontribusi dalam menyembuhkan komunitas

dan individu yang menderita akibat pelanggaran, sementara yang lainnya mengupayakan keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku.

Dalam kerja Komisi ini, keadilan berarti menghukum pelaku, mendapatkan reparasi—baik kolektif maupun individual—bagi korban, dan memastikan bahwa kejahatan yang telah dilakukan tidak akan terjadi lagi. Reparasi merupakan bagian yang krusial dalam pengalaman Peru, justru karena pemerintah Peru berhutang pada korban yang gagal dilindunginya maupun karena reparasi ini akan membantu memulihkan hak kepada semua anggota masyarakat Peru.

Kelompok-kelompok lain juga yang telah menyumbangkan berbagai taktik lainnya dalam menghantarkan keadilan bagi komunitas-komunitas mereka. Saya harap Anda akan menemukan banyak dari pengalaman di sini berguna dalam kerja-kerja Anda.

Sofia Macher

Mantan Anggota, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Peru

Mantan Direktur Eksekutif, National Coordinator of Human Rights, Peru

Bahkan ketika pelanggaran HAM berakhir—ketika perang usai atau rezim lama telah ditumbangkan, ketika korban telah dibebaskan atau telah melarikan diri, atau waktu telah berlalu begitu saja—kebutuhan akan kerja-kerja pembelaan hak asasi manusia yang kreatif tidaklah berakhir. Dampak dari pelanggaran HAM meluas melampaui penderitaan langsung: ia dapat menghancurkan kepemimpinan dalam sebuah komunitas, memerosotkan perekonomian dan mengikis solidaritas masyarakat sipil.

Kebisuan yang membeku bisa menghalang-halangi para korban, keluarga dan komunitas untuk membangun kembali kepemimpinan dan jalinan struktur sosial, mencegah pelaku diseret ke hadapan keadilan, sehingga pada gilirannya menghambat komunitas untuk dapat berekonsiliasi dan melangkah ke depan. Taktik-taktik yang dijelaskan di dalam Bab ini semuanya telah digunakan untuk mengupayakan pemulihan, keadilan dan rekonsiliasi bagi korban dan komunitas, untuk membangun kembali kepemimpinan dan memajukan visi tentang masyarakat yang bebas dan adil.

Secara tradisional pembedaan dibuat atas keadilan restoratif (restorative justice) dan keadilan retributif (retributive justice). Di mana keadilan restoratif menekankan pemulihan luka para korban, pelaku pelanggaran maupun komunitas; sementara keadilan retributif menekankan penghukuman atas pelaku pelanggaran serta ganti rugi (redress) bagi korban. Kedua pendekatan tersebut adalah berguna dan penting bagi tugas-tugas membangun kembali dan memulihkan komunitas yang sudah rusak. Kedua pendekatan itu dicakup di sini.

Taktik-taktik di sini juga, sementara terlihat seperti berfokus pada masa lalu, namun memainkan peran penting dalam mencegah pelanggaran di masa depan. Taktik-taktik ini telah digunakan untuk memperkuat komunitas yang rusak, meruntuhkan dinding impunitas yang melindungi para pelaku pelanggaran HAM; menghukum para pelaku pelanggaran HAM tersebut dan mengungkapkan secara lantang tekad: bahwa pelanggaran HAM tidak akan ditoleransi di masa mendatang; seraya membangun dokumentasi yang mengakui dan memvalidasi rasa sakit yang diderita korban dan keluarganya;

merekam pola-pola pelanggaran HAM yang—jika kita waspadai—akan dapat membantu kita mengenali dan menghentikan pelanggaran-pelanggaran di masa depan.

Taktik-taktik di dalam Bab ini dibagi ke dalam tiga kelompok:

- 1. Mengingat pelanggaran—taktik yang menerangi hakikat dan jangkauan dari pelanggaran, atau identitas dari pelaku pelanggaran dan korban.**
- 2. Memperkuat individu dan komunitas—taktik yang menggunakan intervensi kesehatan mental, rehabilitasi dan teknik-teknik lain untuk menyembuhkan individu dan komunitas.**
- 3. Mengupayakan ganti rugi (redress)—taktik yang mengupayakan keadilan melalui litigasi, sanksi, reparasi atau cara-cara lain.**

Mengingat Pelanggaran

Mungkin ada yang berpikir bahwa akan jauh lebih mudah jika kita melupakan saja pelanggaran yang kita dengar, saksikan dan alami sendiri. Tetapi pilihan ini kemudian akan meninggalkan luka menganga yang tidak akan kunjung sembuh, serta membuka pintu lebar-lebar bagi pelanggaran serupa di waktu mendatang. Taktik-taktik yang dalam gugus ini mengupas dokumentasi pelanggaran dan pola-pola pelanggaran yang bersifat permanen dan publik. Tanpa catatan publik semacam itu, ingatan akan menumpul, karena dokumen-dokumen yang ada mungkin rusak atau tersembunyi di balik timbunan birokrasi yang berlapis-lapis. Berkas-berkas yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia memang memiliki kecenderungan untuk “menghilang” jika tidak dirawat dengan seksama. Di mana saja dokumen-dokumen ini bisa ditemukan, diperlukan upaya khusus untuk menggantinya, mengabadikannya dan menjadikannya milik publik.

Dalam kondisi ketika satu-satunya dokumentasi terbaik terletak pada tubuh-tubuh terkubur di dalam liang-liang pembantaian massal yang tak tertandai, maka dibutuhkan taktik lain dengan ketrampilan forensik

khusus untuk merekamnya. Ada pula kasus-kasus lainnya di mana fakta pelanggaran HAM telah cukup diketahui oleh masyarakat secara umum, tetapi generasi berikutnya berada dalam bahaya untuk lupa mengenai peristiwa-peristiwa penting yang pernah terjadi tersebut. Mekanisme-mekanisme di sini tidak hanya menjaga agar ingatan tetap segar, tetapi juga membuatnya menjadi relevan. Selain itu dalam beberapa situasi di bawah ini, ketika pelanggaran HAM telah menyebar dan menjalar luas, Komisi Kebenaran dan Tribunal Publik memberi korban, keluarga korban dan—dalam beberapa kasus—pelaku pelanggaran, kesempatan untuk menuturkan kesaksian-kesaksian mereka.

Membuka berkas dan catatan yang berisikan informasi mengenai pelanggaran HAM—khususnya mengenai kematian, penyiksaan dan penghilangan paksa—kepada masyarakat luas dapat mengabdikan pada beberapa tujuan sekaligus. Praktik-praktik ini dapat menghantarkan keluarga-keluarga korban pada kapasitas untuk “menutup buku masa lalu” karena segala kepedihan dan penderitaan mereka telah diakui secara terbuka; ini juga membantu mereka mengistirahatkan kecamuk problem masa lalu pada tempatnya dan melangkah ke depan. Kepastian ini juga memungkinkan mereka untuk menyelenggarakan ritual tradisional menurut budaya dan keyakinan mereka, untuk “menutup masa lalu”. Ini juga membantu pihak keluarga menghimpun informasi dan catatan solid untuk upaya litigasi terhadap para pelaku pelanggaran. Dokumentasi-dokumentasi publik semacam ini juga sekaligus menjadi kenangan akan sesuatu yang sungguh-sungguh terlihat (visible), dapat diserap secara inderawi (tangible) dan kehadirannya ini dapat terus menjadi bahan diskursus publik, sedemikian rupa sehingga merupakan suara bagi kaum yang tak bersuara.

Jawaban bagi Keluarga Korban: Mendokumentasikan catatan kejahatan HAM untuk mempromosikan pemulihan dan keadilan

Sebuah kelompok di Kamboja telah mendokumentasikan kejahatan genosida

Khmer Merah dan membuat catatan itu dapat diakses oleh publik, mengabadikan ingatan kolektif baik bagi mereka yang diamuk genosida maupun bagi mereka yang melakukan kejahatan.

Documentation Center of Cambodia—DC-Cam (Pusat Dokumentasi Kamboja) menghimpun catatan mengenai korban dan pelaku kejahatan genosida di Kamboja sehingga pihak keluarga korban dan kerabatnya dapat mempelajari nasib dari orang-orang yang dihilangkan secara akurat. Pada saat yang sama, *DC-Cam* mengumpulkan bukti-bukti hukum yang mungkin yang dapat digunakan untuk menghadapkan para mantan pimpinan Khmer Merah ke pengadilan.

Sistem Penelusuran Berkas Keluarga *DC-Cam* membantu keluarga korban maupun keluarga pelaku kejahatan untuk menemukan nasib dari orang yang mereka cintai dengan menelusuri catatan rinci yang disimpan oleh rezim Khmer Merah (1975-1979). *DC-Cam* memiliki empat *database* yang terbentuk dari katalog ratusan ribu halaman dokumen, foto maupun wawancara yang relevan. *Project* pemetaannya telah menggunakan teknologi GPS untuk mengidentifikasi 19.466 kuburan massal, 168 tempat penahanan dan 77 tanda peringatan genosida di 170 distrik di Kamboja dan di hampir semua provinsi negara tersebut.

Walaupun kebanyakan orang kerap menemukan bahwa pihak kerabat mereka telah dieksekusi oleh Khmer Merah, pihak keluarga masih dapat menemukan kelegaan dan ‘perasaan penutupan atau akhir pencarian’ ketika mengetahui secara akurat peristiwa yang pernah terjadi. Dari sini komunitas korban juga dapat memulai proses pemulihan dari trauma akibat genosida. Hasil dokumentasi kerap dapat menyingkapkan lokasi dari jasad-jasad yang dihilangkan, juga memungkinkan pihak keluarga untuk menyelenggarakan ritus yang layak bagi arwah para korban. Kira-kira 80% dari keluarga yang pernah mengunjungi pusat dokumentasi ini untuk mencari keberadaan orang-orang yang mereka cintai, mendapatkan jawaban mengenai apa yang sesungguhnya terjadi.

Tujuan utama *DC-Cam* adalah untuk menjaga agar kenangan akan genosida itu tetap hidup, sehingga membantu rakyat Kamboja dalam mencari keadilan dan membangun masa depan yang kukuh, serta mencegah agar kebiadaban masif semacam itu tidak pernah terjadi lagi.

Taktik *DC-Cam* terbukti efektif di Kamboja, di mana rakyatnya telah diterpa oleh praktik-praktik kejahatan yang begitu panjang dan kelam. Negeri-negeri lainnya yang juga pernah mengalami periode kejahatan HAM yang panjang dapat menyimak pelajaran berharga dari pengalaman kelompok tersebut. Untuk membangun *project* penyimpanan informasi terpusat, sebuah kelompok perlu menelusuri sejauh mana

pihak pelaku kejahatan meninggalkan dokumen atau bukti apapun di belakang dan direkomendasikan untuk berhubungan dengan kerja-kerja forensik (lihat hal 91). Di Kamboja genosida disasarkan terutama atas kelas terpelajar, diikuti dengan penghancuran atas institusi dan sistem penegak keadilan; yang berarti bahwa informasi yang berhasil dihimpun tadi hanya dapat digunakan ketika sistem ini dibangun kembali.

Bagaimana Anda dapat mencatat sejarah pelanggaran di komunitas Anda? Bagaimana Anda dapat menggunakan sejarah ini untuk mempromosikan pemulihan dan keadilan?

Membuka Arsip Bersejarah mengenai Teror Masa Lalu: Mempromosikan keadilan dengan cara mengedepankan hak legal untuk mengakses dokumen bagi korban

Di Paraguay, *Centro de Documentación y Archivo—CdyA* (Pusat Dokumentasi dan Kearsipan) mengambil kemanfaatan dari sebuah aturan hukum yang memberikan mantan tahanan [politik] hak atas data *habeas*—hak untuk mengontrol dokumen yang berkaitan dengan kasus mereka sendiri—guna membangun sebuah “arsip teror”. *CdyA* kemudian membuka arsip kepolisian untuk publik setelah lewatnya 35 tahun era kediktatoran militer di Paraguay.

Konstitusi Paraguay—seperti Konstitusi di lima negara Amerika Latin lainnya—mencakup hak atas data *habeas*: hak mantan tahanan untuk mengontrol data yang dihimpun mengenai diri dan pengalaman mereka sendiri. Sesudah mengajukan petisi untuk memperoleh arsipnya sendiri, Martin Almada—seorang mantan tahanan politik—dengan didampingi oleh seorang hakim lokal, mendapati ribuan arsip penahanan di kantor polisi di Lambare pada 1992.

Arsip-arsip ini mendokumentasikan berbagai pengalaman penahanan secara rinci—termasuk penyiksaan dan pelanggaran HAM lainnya—mengukuhkan berbagai kisah perorangan mengenai penahanan selama era kediktatoran-kediktatoran Amerika Latin. Arsip-arsip ini mengonfirmasikan hilangnya sekian banyak warga

negara dan sebagai bukti terbantahkan mengenai praktik-praktik kekejaman meluas yang dilancarkan personil polisi dan militer di era kediktatoran sejumlah negara Amerika Latin.

Pada akhirnya pengadilan Paraguay, termasuk Mahkamah Agung, memerintahkan bahwa arsip-arsip ini harus dapat diakses oleh publik. Arsip-arsip bersejarah tersebut yang kini berada di bawah kontrol *CdyA*, terbuka bagi peneliti, investigator, aktivis HAM dan publik pada umumnya. *CdyA* telah menggunakan arsip-arsip tersebut sebagai basis untuk kasus-kasus hukum, mengorganisir tribunal untuk memproses para pelaku pelanggaran, penyiksaan dan penahanan ilegal yang disponsori oleh negara. *CdyA* juga memberikan kontribusi akses informasi kepada pihak Komisi Kebenaran Paraguay. Berkat ketekunan kerja-kerja *CdyA*, tidak kurang dari dua puluh orang mantan pejabat telah berhasil dihadapkan ke pengadilan. Arsip-arsip yang sama ini juga telah dipergunakan untuk melengkapi berkas kasus ekstradisi atas Jenderal Augusto Pinochet dari Inggris ke Spanyol pada tahun 1998.

CdyA telah mentransfer 90% dari keseluruhan materi arsip itu ke dalam format mikrofilm dan telah mendigitalisasikannya juga. Kelompok ini juga berusaha mengangkat arsip-arsip tersebut agar diakui ke dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO (*UNESCO's World Heritage List*).

Ketersediaan informasi yang rinci mengenai pelanggaran HAM dapat memiliki dampak yang penting pada mereka yang mengalami pelanggaran maupun bagi pihak penyelenggara keadilan di sebuah negeri, pasca dilakukannya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Upaya Almada di Paraguay mengonfirmasikan pengalaman dari banyak korban dan menjadikan permintaan bantuan hukum (*legal recourse*) sebagai sebuah pilihan yang patut dipertimbangkan.

Sementara arsip-arsip di Paraguay ditemukan secara tidak sengaja, taktik dengan tujuan mengakses arsip yang berhubungan dengan pelanggaran HAM telah diselenggarakan oleh beberapa pemerintah. Sebagai contoh, di Jerman dan beberapa negara Eropa Timur, pemerintah telah membuka arsip para korban dari pihak kepolisian rahasia. Di Jerman, arsip-arsip dipelihara oleh sebuah badan independen bernama Otoritas Gauck (*Gauck Authority*) dan terbuka bagi para korban, tetapi tidak bagi publik pada umumnya. Di Cekoslovakia dan negara-negara lainnya, arsip memang dibuka secara selektif (tidak tersedia khusus bagi korban), tapi toh sejumlah arsip yang 'bocor' tetap bisa diakses oleh publik juga.

Sudah ada sejumlah kritisisme serta pelajaran berharga yang dapat dipetik dari eksplorasi taktik yang satu ini. Tina Rosenberg dari program HAM *Harvard Law*

School yang mendalami kajian mengenai Komisi Kebenaran misalnya, menyatakan, “Fakta bahwa arsip-arsip di Jerman telah dibuka amat membantu dalam mengatasi problem validitas atas arsip-arsip tersebut. Para korban dapat membantu mengonfirmasi apakah pihak-pihak yang terindikasi menjadi ‘agen atau informan negara’ di masa lalu, memang telah melakukan praktik-praktik yang disangkakan”. Ini adalah mekanisme yang terbuka untuk pemeriksaan mandiri, sesuatu yang tidak ada dalam versi Ceko. Selain itu di Jerman, para korban dapat memilih apakah ia ingin mempublikasikan informasi mengenai siapa yang telah memata-matainya di era otoriter dulu. Yang satu ini bukanlah informasi publik.

Hukum apa yang ada di negara Anda yang mungkin berguna dalam memperoleh akses kepada dokumen yang mengonfirmasikan pelanggaran dan mengidentifikasi pelaku pelanggaran?

Merawat Ingatan: Mengoordinasikan upaya pemeliharaan informasi kearsipan antar organisasi dan menciptakan sistem untuk mengaksesnya secara kolektif

“*Nunca Mas*” (“Jangan Lagi”) adalah janji yang kerap digemakan begitu rangkaian pelanggaran HAM berhasil diungkap, akan tetapi janji ini tidak akan bisa ditepati jika ingatan mengenai pelanggaran, para korban serta orang-orang yang telah berjuang melawan pelanggaran tersebut, tidak dirawat dan ditopang terus kehidupannya. Sayangnya, informasi dahsyat yang tersimpan dalam arsip sejumlah organisasi HAM kerap kali tidak diketahui oleh dunia luar dan tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang potensial untuk menggunakannya, untuk memastikan bahwa sejarah kelam serupa tidak akan terulang lagi. *Memoria Abierta*⁴ adalah sebuah aliansi dari delapan organisasi HAM di Argentina yang telah menggabungkan kerja-kerja mereka untuk menciptakan *database* yang dapat diakses secara publik, yang diharapkan akan berkontribusi pada pengartikulasian ingatan secara kolektif dan berkesinambungan.

Memoria Abierta telah membangun sebuah sistem yang memudahkan akses atas seluruh arsip-arsip publik dalam beragam bentuk dokumen, foto, wawancara

4 Terjemahan harfiah ‘Ingatan Terbuka’ (eds.).

yang menjadi saksi atas praktik-praktik terorisme negara yang brutal di Argentina, lengkap dengan profil korban serta orang-orang yang bangkit melawan kebrutalan tersebut. Sementara setiap orang dengan akses internet dapat menelusuri katalog *online* dari arsip-arsip tersebut, namun dokumen-dokumen sesungguhnya tersimpan dengan rapi di berbagai kantor organisasi anggota atau di kantor *Memoria Abierta* sendiri. *Database* menyediakan sebuah indeks terpusat dari semua materi, yang dapat ditelusuri dengan mudah oleh setiap pengguna. Indeks ini juga menginformasikan lokasi riil dari dokumen, foto dan video asli tersebut, sehingga peneliti yang berminat dapat mempersiapkan kontak lebih jauh mengenainya. *Project* ini telah berhasil menciptakan perangkat lunak khusus yang dikembangkan dalam format 'open source' ('sumber terbuka'), untuk membantu organisasi-organisasi lainnya menyusun *database* serupa.

Arsip-arsip *Patrimonio Documental* (Program Warisan Dokumentaris) mencakup lima bagian: (1) Program Warisan Dokumentaris itu sendiri, yang mencakup sekitar 22.000 dokumen mengenai terorisme negara; (2) Program Topografi Ingatan (*Topography of Memory Program*), yang dilengkapi dengan berbagai peta, dokumen dan kesaksian lisan mengenai situs-situs historis yang berkaitan dengan terorisme negara, serta lebih dari 340 pusat penyiksaan yang tersembunyi di antara tempat-tempat biasa di seluruh penjuru negeri; (3) Program Arsip Fotografis, yang mencakup gambar-gambar digital dari organisasi-organisasi hak asasi manusia, koleksi pribadi dan media; (4) Program Arsip Lisan, mencakup ringkasan atas lebih dari 320 wawancara dengan orang-orang yang kehidupannya dalam cara tertentu telah dirusak oleh praktik-praktik terorisme negara; dan (5) dokumen-dokumen dari *Memoria Abierta* sendiri.

Memoria Abierta adalah sebuah aliansi yang terbentuk dari beberapa organisasi, yakni *Abuelas de Plaza de Mayo*⁵, *Asamblea Permanente por los Derechos Humanos*,⁶ *Asociación Buena Memoria*, *Centro de Estudios Legales y Sociales—CELS*,⁷ *Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas*,⁸ *Fundación Memoria Histórica y Social Argentina*,⁹ *Madres de Plaza de Mayo—Linea Fundadora*,¹⁰ dan *Servicio Paz y Justicia*¹¹. Aliansi ini dibentuk untuk mengembangkan dan mendukung *project*

5 Para Nenek [Korban] dari Plaza de Mayo (eds.)

6 Majelis Permanen untuk Hak Asasi Manusia (eds.).

7 Pusat Studi Hukum & Masyarakat (eds.)

8 Keluarga Orang Hilang & Tahanan Karena Alasan-alasan Politik (eds.).

9 Lembaga Ingatan Sejarah & Sosial Argentina (eds.).

10 Ibu-ibu dari Plaza de Mayo—Garis Pendiri. Garis Pendiri (*Linea Fundadora*) ini adalah faksi yang lebih 'moderat' dibandingkan faksi lainnya, yakni *Asociacion Madres de Plaza de Mayo* yang mengadopsi garis yang lebih 'keras' atau 'kiri' (eds.).

11 Pelayanan Perdamaian & Keadilan (eds.).

yang mendorong komunitas dan individu melestarikan ingatan akan peristiwa-peristiwa kelam selama era kediktatoran militer. *Memoria Abierta* juga mensponsori inisiatif untuk mempromosikan debat mengenai penciptaan situs-situs ingatan (*sites of memory*) dan ruang untuk refleksi publik. Arsip-arsip itu satu hari nanti akan menjadi bagian dari koleksi utama Museum Ingatan.

Taktik mengoordinasikan arsip dari begitu banyak organisasi dapat digunakan di setiap negara di mana ada lebih dari satu kelompok yang mengoleksi data pelanggaran HAM. Ini dapat menjadi bagian dari sebuah *project* “ingatan”, akan tetapi dapat juga dipergunakan di negeri-negeri lain di mana berbagai ornop sedang melacak berbagai pelanggaran HAM yang tengah berlangsung dan memerlukan akses informasi sebanyak mungkin.

Antropologi Forensik: Menggunakan ilmu forensik untuk mengidentifikasi jasad korban dan penyebab kematian

Ketika dokumen-dokumen resmi tidak lagi tersedia secara memadai atau justru sama sudah dimusnahkan, kerja-kerja forensik akan dapat membantu menghadirkan kembali catatan untuk litigasi dan memberikan keluarga korban informasi yang dibutuhkan untuk melakukan ‘penutupan’ (*closure*). Kerja forensik merupakan cara obyektif untuk mencatat pelanggaran. Dikarenakan bukti-bukti yang dihidirkannya adalah ilmiah (*scientific*), bukti forensik ini bahkan memiliki bobot pembuktian hukum yang lebih tinggi dibandingkan kesaksian lisan maupun dokumentasi tertulis, dalam membuktikan pelanggaran hak asasi manusia. Penemuan dan penggalian kembali jenazah korban juga memungkinkan pihak keluarga untuk dapat menyelenggarakan ritual tradisional, berkabung dan—kendati masih terluka—dapat melangkah maju melanjutkan kehidupan mereka.

Lebih dari dua dekade yang lalu, *Equipo Argentino de Antropologia Forense*—EAAF (Tim Antropologi Forensik Argentina) telah mengidentifikasi berbagai jenazah korban pelanggaran negara. Selama kediktatoran militer Argentina (1976-1983), 10.000 hingga 30.000 orang telah dibunuh atau “dihilangkan” oleh negara. Secara ringkas tujuan EAAF berlapis tiga: mengembalikan jenazah korban kepada keluarga mereka dan dengan demikian membantu proses pemulihan; menyediakan bukti hukum terhadap para pelaku pelanggaran atau kekerasan negara; menyediakan pelatihan serta dukungan bagi pembentukan tim-tim forensik lainnya di negeri-negeri yang telah mengalami periode kekerasan masif dan hendak menginvestigasi masa lalunya sendiri.

EAAF memiliki tim investigasi permanen yang meneliti informasi mengenai orang-orang yang dihilangkan. Kelompok itu biasanya mengawali penanganan sebuah kasus dengan investigasi awal untuk memastikan keberadaan tempat penguburan orang-orang yang dihilangkan tersebut, mewawancarai pihak kerabat, teman, sesama mantan tahanan lainnya, teman satu sel, maupun aktivis politik mengenai karakteristik fisik korban serta kemungkinan mengenai waktu dan tempat kematian. EAAF juga mempelajari catatan polisi dan birokrasi, yang berisikan deskripsi fisik, sidik jari, catatan otopsi, bahkan seringkali harus mendapatkan perintah pengadilan untuk memperoleh hak untuk masuk ke dalam arsip-arsip polisi. Prosesnya bergerak maju ketika kelompok itu telah memperoleh sepuluh dokumen lisan atau tertulis.

Sekali kemungkinan lokasi tempat pemakaman telah diidentifikasi, tim mendekati pihak keluarga korban; EAAF tidak akan melanjutkan investigasi tanpa kemauan dan ijin dari pihak keluarga. Sekali pihak keluarga menyetujui dan kelompok itu telah menerima otorisasi dari prosecutor atau otoritas hukum, tim ini memulai proses penggalian kembali jasad tersebut dari kuburannya. Pihak keluarga diterima untuk berpartisipasi dalam beberapa langkah. Kelompok ini menggunakan teknik arkeologis standar untuk mengangkat jasad seseorang. Kerja-kerja ini kemudian dilanjutkan di laboratorium, tempat para ilmuwan EAAF berupaya mencocokkan jasad dengan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya serta menetapkan penyebab dan cara kematian.

Melalui proses ini, EAAF telah mengidentifikasi ratusan jenazah korban, menghantarkan 'penutupan' bagi pihak keluarga dan mengontribusikan bukti bagi tribunal di level nasional maupun internasional, juga bagi Komisi Kebenaran maupun pengadilan lokal. EAAF sendiri telah pula melatih banyak kelompok lainnya di seluruh dunia dengan teknik-tekniknya tersebut. Anggota tim EAAF menyatakan bahwa hal ini merupakan proses penting untuk meningkatkan kerjasama di antara negeri-negeri di dunia Selatan.

*Adalah momen yang amat sulit kala kami mendekati pihak keluarga
dengan informasi mengenai (kemungkinan) keberadaan
orang-orang yang mereka cintai.
Hal ini memang dapat membantu mengakhiri pencarian panjang
atas orang-orang yang mereka cintai,
di mana pihak keluarga tidak selalu siap mendengarnya.
Kami membangun hubungan dengan pihak keluarga
dan terus mendampingi sampai mereka siap.
Kami jelaskan apa yang akan mereka jumpai,
apa yang dapat mereka harapkan,
dan mendorong mereka*

*untuk mengajukan pertanyaan apa pun
atau berpartisipasi dalam proses.*

*Luis Fondebrider
Presiden EAAF, Argentina*

Ketika EAAF menginvestigasi berbagai laporan kematian korban, kelompok itu memberikan kontrol utama atas proses itu kepada pihak keluarga dan masyarakat korban. Hal ini penting bagi kelompok masyarakat yang tidak hanya telah mengalami penyingkiran di bawah pemerintahan sewenang-wenang, namun juga telah dijauhkan dari segala proses rekonsiliasi. Pendekatan EAAF memang mensyaratkan tingkat keterbukaan dan kebebasan politik tertentu, tetapi pengalaman kelompok itu dalam mentransfer taktiknya ke lebih dari 30 negeri lainnya, menunjukkan bahwa dukungan pemerintah yang bersifat total tidaklah selalu diperlukan.

Ada pula kelompok lain di Guatemala yang juga bekerja dengan masyarakat korban selama proses penggalian kembali jasad-jasad korban dari kuburnya (ekshumasi), akan tetapi lebih berfokus pada pelayanan psikososial. *Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial*—ECAP (Tim Penelitian dan Tindakan Psikososial Komunitas) bekerja sama dengan *Fundación de Antropología Forense de Guatemala* (Lembaga Antropologi Forensik Guatemala) untuk memberikan dukungan kepada keluarga dan masyarakat korban sebelum, selama dan setelah ekshumasi.

ECAP mengorganisir kelompok-kelompok pendukung agar pihak keluarga dapat dengan aman berbagi rasa berkaitan dengan kehilangan mereka, di situ mereka dapat berefleksi, tanpa rasa takut menuturkan kisah mereka, belajar menghadapi dampak kekerasan dan memahami situasi yang ada saat ini, sehingga mereka dapat kembali merencanakan masa depan mereka. Pihak keluarga juga menerima pendampingan dalam menguburkan kerabat mereka secara hukum maupun menurut tradisi mereka sendiri, membantu mengabadikan ikatan di antara mereka yang masih hidup dan yang sudah berpulang.

Setelah memberikan konseling pra ekshumasi, pihak konselor menemani keluarga ke situs ekshumasi untuk memberikan dukungan pihak keluarga menghadapi kenyataan kematian kerabat mereka dan terus melanjutkan pendampingan untuk membantu mereka menerima kenyataan ini. Dalam berbagai komunitas yang terpa kekerasan-kekerasan politik yang meluas—yang kerap berlangsung di banyak wilayah pedesaan Guatemala—pihak konselor melakukan identifikasi dampak

kekerasan serta membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mendorong diskusi mengenai berbagai cara komunitas dapat dipulihkan (sebagai suatu keseluruhan). Untuk berkontribusi pada proses pemulihan itu, ECAP juga mendukung komunitas dalam penciptaan simbol-simbol peringatan dan cara-cara lain untuk mengenali trauma masa lalu. Kesemua program ini meningkatkan kesadaran kritis akan sejarah, masa kini dan masa depan komunitas. Begitu banyak pengalaman penting dalam mengelola emosi dan tantangan terkait proses pemulihan kembali hak-hak mereka, dapat dipelajari dari sini.

Bagaimana Anda bisa menggunakan forensik
atau kepakaran teknis lainnya
untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM?

Bicara Kebenaran: Membentuk sebuah Komisi Kebenaran resmi untuk menginvestigasi dan mengakui pelanggaran HAM berat

Dalam dua dekade yang baru berlalu, sejumlah negeri yang baru keluar dari periode pelanggaran yang panjang telah membentuk berbagai forum bagi para korban (dan terkadang bagi pelaku pelanggaran juga), untuk menuturkan kisah mereka. Proses penceritaan kebenaran (*truth-telling*) ini dapat menarik para korban keluar dari isolasi yang sengaja dibangun oleh rezim pelaku pelanggaran, guna terus melanggengkan atmosfir kerahasiaan (agar para korban tidak saling mengetahui bahwa para tetangga mereka juga menderita). Idealnya, taktik penceritaan kebenaran ini melibatkan seluruh penduduk, atau setidaknya sejumlah besar segmen daripadanya, untuk mendorong terajutnya kembali proses pemulihan dan menjauhkan dari kecenderungan fragmentatif.

Komisi Kebenaran adalah salah satu taktik pengungkapan kebenaran yang digunakan oleh berbagai pemerintah untuk mengawali proses rekonsiliasi. Mandat mereka—yang menetapkan tujuan dan otoritas mereka—lazimnya ditetapkan oleh badan legislatif atau badan eksekutif negara. Di Afrika Selatan, keputusan strategis dibuat pada akhir era kekuasaan pemerintahan *apartheid* untuk membentuk Komisi Kebenaran, ketimbang sekadar menuntut para pelaku pelanggaran HAM berat di persidangan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk oleh parlemen Afrika Selatan dengan mandat untuk menyusun gambaran seutuh mungkin mengenai

hakikat, penyebab dan cakupan pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dilakukan—oleh semua pihak yang berkonflik—antara tanggal 1 Maret 1960 dan 10 Mei 1994.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Afrika Selatan diprakarsai oleh legislasi nasional pada tahun 1995, setelah melalui periode debat publik. Mandatnya adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh badan-badan negara atau oposisi bersenjata selama masa *apartheid* dan tujuannya adalah untuk mendorong keutuhan nasional dan rekonsiliasi. Komisi ini diharapkan dapat mengajukan rekomendasi bagi reformasi kebijakan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang. Di samping dengar pendapat publik mengenai pemberian amnesti dan HAM, dengar pendapat khusus yang berfokus pada pelanggaran yang diderita oleh kaum perempuan dan anak-anak serta kelompok korban lainnya juga diselenggarakan. Berbagai dengar pendapat publik lainnya juga diselenggarakan mengenai peran dari komunitas berbasis agama/kepercayaan tertentu, institusi penyelenggara kesehatan, sektor hukum, sektor pelaku bisnis dan institusi-institusi lain yang secara pasif atau aktif telah berkontribusi dalam pelanggaran HAM. Forum-forum dengar pendapat publik ini diselenggarakan di seluruh penjuru negeri dan media penyiaran mengadakan rekaman maupun peliputan langsung. Semua media meliput KKR secara ekstensif nyaris di sepanjang keberadaan Komisi tersebut.

Tidak kurang dari dua puluh ribu korban telah memberikan kesaksian. Agar proses tersebut senyaman mungkin bagi korban, KKR menggunakan tenaga *briefers*—pendamping khusus (juga merupakan taktik yang menarik) yang direkrut dari berbagai profesi/kalangan yang bersimpati (rohaniwan, pekerja sosial, perawat dan lain-lainnya) yang memberikan dukungan kepada korban sebelum, selama dan setelah proses tersebut. Para pendamping khusus tersebut menerima pelatihan ekstensif mengenai proses dan struktur Komisi.

Satu aspek unik dari mandat Komisi itu adalah amnesti bersyarat bagi para pelaku pelanggaran HAM yang bersedia mengakui secara publik perbuatan mereka selengkap-lengkapnyanya. Kriteria bagi amnesti mencakup penyingkapan sepenuhnya dari kejahatan sebagaimana juga kepastian bahwa tindakan-tindakan tersebut memiliki motivasi politis. Amnesti bersyarat ini merupakan kebijakan yang tidak ditempuh dalam sejumlah Komisi Kebenaran sebelumnya yang juga cukup menarik perhatian publik. KKR Afrika Selatan menghasilkan pengakuan publik yang memaparkan secara rinci banyak dari kejahatan yang dikenal paling buruk selama era *apartheid*, termasuk pembunuhan terhadap aktivis Steven Biko di tahun 1977. Amnesti memang tidak dijaminakan bagi mereka yang memberikan kesaksian,

akan tetapi langkah-langkah tegas untuk menyeret ke pengadilan mereka yang tidak dianugerahi amnesti atau tidak tampil memberikan kesaksian, tidak kunjung diterapkan.

Laporan final Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dikeluarkan dalam tujuh jilid tebal antara tahun 1998 dan 2002. Kendati dampak jangka panjangnya belum terlihat, beberapa pencapaian mendesak dari laporan itu mencakup rekomendasi mengenai cara mencegah pelanggaran di masa mendatang, yang telah mempengaruhi pemerintah baru, dan himpunan dokumentasi tak terbantahkan mengenai pelanggaran HAM selama era *apartheid*. Adalah penting untuk dicatat bahwa KKR belum memenuhi semua harapannya. Tak seorang pun dari pelaku pelanggaran yang menolak memberi kesaksian yang diseret ke pengadilan, walaupun prosesnya memungkinkan hal ini, sementara Afrika Selatan terus bergulat menangani berbagai persoalan reparasi.

Baca lebih jauh mengenai kegunaan dari *briefers* di dalam Komisi pada situs web <www.newtactics.org>, di bawah *Tools for Action*.

Berbagai Komisi Kebenaran telah digelar di lusinan negeri dan kondisi, dengan berbagai mandat dan hasil-hasilnya. Beberapa di antaranya memiliki kewenangan *subpoena*, sementara yang lainnya tidak memiliki kapasitas hukum yang signifikan dalam penyelenggaraannya. Beberapa Komisi telah mengadakan dengar pendapat publik (bersifat terbuka) atau bahkan ditayangkan secara langsung oleh berbagai stasiun TV, sementara ada pula Komisi-Komisi lainnya yang hampir sepenuhnya bekerja di balik pintu-pintu tertutup. Beberapa Komisi merekomendasikan reparasi finansial atau reparasi lainnya bagi para penyintas (korban yang selamat), juga, dalam upaya mencegah pelanggaran HAM di masa mendatang, banyak yang telah diminta untuk menyusun rekomendasi substansial untuk perubahan di dalam struktur politik, militer, kepolisian atau kehakiman, atau di ranah ruang sosial maupun pendidikan.

Glenda Wildschut, seorang mantan komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan, mencatat bahwa Komisi itu beroperasi di bawah beberapa keterbatasan. Di antaranya:

- KKR hanya memeriksa kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Korban

pemindahan paksa, perampasan tanah, sementara hukum terkait perkawinan campuran serta sejumlah ketentuan lainnya tidak dapat dimintakan klarifikasinya di bawah KKR.

- Komite Reparasi KKR hanya diberikan mandat untuk membuat rekomendasi kebijakan kepada parlemen, sementara Komite Amnesti memiliki kekuasaan untuk memberikan amnesti secara langsung (immediate amnesty).
- KKR harus mencakup periode 34 tahun—dari 1960 hingga 1994—dalam masa bakti hanya tiga tahun.
- KKR memiliki sedikit sumber daya yang begitu minim untuk bisa memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi korban.
- Taktik KKR ini masih kontroversial. Sejumlah pihak percaya bahwa Komisi Kebenaran hanya menambahkan penderitaan dan perasaan tak berdaya bagi rakyat, karena di satu sisi berbagai pelanggaran HAM tersebut memang menjadi menjadi terang benderang, tetapi tidak ada penghukuman terhadap para pelaku; sementara Komisi ini diklaim akan dapat digunakan sebagai pengganti (substitusi) bagi tindakan hukum. Beberapa kalangan lainnya berpendapat bahwa masyarakat yang telah terbelah sedemikian mengakar, tidak akan dapat mendorong prosekusi (menyeret para pelaku ke pengadilan) tanpa keteguhan prinsipil dan menjinakkan sisa-sisa kekuasaan para pelaku pelanggaran HAM untuk melawan perubahan demokratik. Tetapi Komisi Kebenaran dapat digunakan sebagai bagian dari strategi lebih besar yang mencakup baik pengungkapan kebenaran maupun penghukuman bagi pelaku pelanggaran, atau—sebagaimana dalam kasus Argentina—dapat membantu menciptakan iklim politik yang dibutuhkan untuk memulai prosekusi.

Keadilan Internasional untuk Kejahatan Perang: Menggelar tribunal internasional untuk meningkatkan kesadaran dan mengupayakan reparasi bagi korban kejahatan perang

Sebuah jaringan HAM di Asia berhasil mengorganisir sebuah tribunal internasional untuk mengawetkan ingatan mengenai pelanggaran yang telah terjadi sekian dekade yang lalu, serta menuntut kompensasi.

Violence Against Woman in War Network—VAWW-NET (Jaringan Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perang), yang berkedudukan di Jepang menciptakan sebuah tribunal untuk mengakui dan mengupayakan keadilan bagi korban kejahatan perang (khususnya kejahatan-kejahatan seksual). Di paruh pertama abad kedupuluh, pemerintah Jepang menciptakan sebuah sistem perbudakan seksual melalui jaringan “stasiun penghibur” (“*comfort stations*”), fasilitas rumah pelacuran yang dikontrol oleh pihak militer. Sekitar 400.000 perempuan dan anak-anak perempuan dipaksa dengan kekerasan untuk masuk ke dalam sistem ini. Nyaris 50 tahun lebih praktik-praktik biadab tersebut tetap tersembunyi di balik kesunyian.

Di tahun tahun 1998, VAWW-NET mengajukan usulan pembentukan sebuah Tribunal Internasional Kaum Perempuan terhadap Kejahatan Perang (*Women’s International War Crimes Tribunal*). *International Organizing Committee*—IOC atau Komite Pelaksana Internasional bagi Tribunal ini dibentuk mencakup perwakilan dari ornop-ornop negeri asal para korban, Jepang serta komunitas internasional. IOC menciptakan sebuah piagam, menyusun peraturan dan prosedur bagi Tribunal dan mempersiapkan rangkaian persidangan di Tokyo pada bulan Desember 2000. Selama proses persidangan di Tribunal ini, tim jaksa penuntut dari sepuluh negeri menyampaikan dakwaan-dakwaannya, termasuk dakwaan gabungan dari Korea Utara dan Korea Selatan. Sebuah panel hakim yang beranggotakan orang hakim mewakili spektrum geografis dan hukum yang seimbang, memimpin jalannya Tribunal tersebut. Tribunal ini mendengarkan kesaksian secara langsung maupun kesaksian yang telah direkam sebelumnya (dokumentasi video) dari para korban—yang secara eufemistis disebut sebagai “perempuan penghibur” (“*comfort women*”). Selain itu didengarkan pula kesaksian dari dua orang mantan serdadu. Para pakar terkait juga didengarkan kesaksiannya mengenai struktur militer Jepang. Para hakim menguji berbagai dokumen resmi, riwayat hidup, catatan harian maupun berkas perkara. Selama penyelenggaraan Tribunal ini gedung pengadilan senantiasa dipadati oleh lebih dari 1.000 orang pengamat maupun kalangan media internasional. Setelah

tiga hari, Tribunal mengeluarkan temuan awal mengenai fakta dan hukum, serta merekomendasikan reparasi.

Tribunal itu berhasil menciptakan catatan historis dan membangkitkan kesadaran komunitas internasional mengenai kejahatan perang (perbudakan seksual). Pada 1995 untuk mengekspresikan permohonan maaf dan penyesalannya pemerintah Jepang serta warga negara Jepang, membentuk *Asian Women's Fund*—AWF (Lembaga Dana Perempuan Asia) serta menyediakan kompensasi bagi para korban. Walaupun dana itu telah meningkat 483 juta yen (sekitar 4 juta dolar AS) untuk korban, banyak *penyintas* dan para pendukung memandang AWF sebagai sebuah alat bagi pemerintah Jepang untuk menghindari pemberian kompensasi langsung; sejumlah korban menolak kompensasi dari dana swasta ini.

Tribunal ini juga berhasil memecah puluhan tahun kesunyian di sekitar subyek yang dianggap tabu mengenai keterlibatan negara Jepang yang begitu sulit untuk ditembus oleh komunitas internasional. Tribunal ini membawa perhatian mendunia kepada penderitaan berkepanjangan para “perempuan penghibur” dan bahkan mendorong donasi swasta bagi para korban; sungguhpun tidak berhasil dalam memaksa pemerintah Jepang untuk bertanggungjawab penuh dengan menyediakan kompensasi langsung.

Di dalam dirinya sendiri, Tribunal semacam ini dapat menjadi wahana mencapai tujuan untuk memecah kebisuan mengenai kasus-kasus lainnya—apakah permasalahan sebesar ini atau pada skala yang jauh lebih kecil—atau juga untuk membangun momentum menuju upaya-upaya internasional lainnya, seperti membentuk wadah pendanaan bagi korban atau membangun gerakan internasional yang lebih kuat.

Prosedur Tribunal Rakyat seperti ini dapat juga digunakan di luar dari negeri tempat berlangsungnya kejahatan. Di Amerika Serikat, *Minnesota Advocates for Human Rights* mengorganisir sebuah Tribunal Rakyat atas rezim Khmer Merah. Dalam Tribunal ini para anggota masyarakat Kamboja setempat memberikan kesaksian mengenai genosida di Kamboja. Forum ini memberikan orang-orang Kamboja kesempatan untuk menuturkan kisah mereka, juga sebuah kesempatan bagi masyarakat Minnesota untuk belajar mengenai orang-orang baru yang hadir di dalam komunitas mereka serta penderitaan yang telah dialami oleh orang-orang tersebut. Sebagai bagian dari *project* itu sebuah dokumen sejarah lisan yang direkam dalam kaset video telah tersusun, yang kini menjadi bagian dari koleksi permanen *Minnesota History Center* (Pusat Sejarah Minnesota).

Bagaimana Anda bisa mengorganisir sekutu-sekutu di negeri yang berbeda untuk menyoroti perjuangan Anda?

MEMPERKUAT INDIVIDU DAN KOMUNITAS

Lingkaran kekerasan dapat diputus oleh pendekatan HAM tradisional, tetapi lingkungan yang penuh kedamaian tidak akan pernah dapat dikembalikan tanpa pertama-tama mengatasi kerusakan akibat represi pada individu-individu dan masyarakat lebih luas yang menjadi target. Taktik dalam bagian ini bertujuan untuk memulihkan individu dan komunitas, memulai tugas kompleks menciptakan lingkaran-lingkaran peristiwa positif yang membuka jalan untuk pemajuan masa depan.

Pelanggaran yang menciderai individu juga merusak keluarga dan komunitasnya. Ia dapat menghancurkan rasa percaya dan rasa aman, serta merusak institusi dan jalinan hubungan yang memungkinkan kita untuk bergantung dan mendukung satu sama lainnya. Pola pelanggaran yang berlangsung lama dan tersebar luas—apakah di bawah rezim yang berwatak tiran atau selama periode perang saudara—dapat mengakibatkan terusirnya penduduk dari tempat tinggalnya dalam jumlah yang begitu besar dan terseret menjadi pengungsi dan—bahkan untuk komunitas yang secara fisik tetap terlihat utuh—dapat mengakibatkan kehancuran psikologis yang akut.

Taktik-taktik berikut ini mencakup cara-cara inovatif membangun kembali komunitas dan memperkuat individu yang kehidupannya telah dirusak oleh pelanggaran HAM. Taktik-taktik ini mencakup intervensi kesehatan mental modern dan teknik-teknik rehabilitasi (walaupun rincian penanganan psikologis berada di luar cakupan

Buku Acuan Kerjaini), seringkali dikombinasikan dengan elemen-elemen budaya tradisional. Adalah penting untuk mencatat bahwa kebanyakan—atau mungkin nyaris semua—taktik ini menarik dukungan dari dalam komunitas itu sendiri. Sebuah komunitas yang dihancurkan oleh konflik atau tirani mungkin tidak terlihat memiliki banyak sumber daya tersisa untuk ditarik daripadanya. Tetapi mengenali dan menopang sumber daya internal yang ada—apakah itu tradisi kultural atau orang-orang dengan ketrampilan dan potensi yang dengan antusias hendak disumbangkannya—adalah amat penting untuk membangun kembali komunitas itu.

Tiga taktik berikut berfokus pada penyembuhan komunitas yang telah dicabik-cabik oleh perang saudara, penyiksaan dan pengusiran. Kadang-kadang—khususnya pada periode pasca perang saudara dan pertikaian antar suku—korban serta pelaku pelanggaran dipaksa untuk membangun kembali kehidupan mereka secara bersama, di dalam komunitas yang sama. Sementara mungkin yang tampaknya paling alamiah adalah berfokus pada kebutuhan korban sambil mengabaikan pelaku pelanggaran sebagai sesuatu yang jahat, akan tetapi bekerja sama dengan para pelaku pelanggaran dapat membantu memenuhi kebutuhan penting komunitas.

Dari Pengungsi ke Paraprofesional Kesehatan Mental:

Membangun kapasitas lokal untuk pelayanan kesehatan mental yang berfokus pada trauma melalui model pelatihan intensif

Center for Victims of Torture—CVT atau Pusat untuk Korban Penyiksaan (yang berkoordinasi dengan *New Tactics in Human Rights Project* dalam menerbitkan Buku Acuan Kerja ini) membantu membangun kembali komunitas di mana sebagian besar dari masyarakat telah mengalami penyiksaan atau trauma perang dan dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka.

CVT melatih pengungsi sebagai mitra konselor di negeri Guinea dan Sierra Leone. Para pengungsi memberikan pelayanan kesehatan mental kepada korban lainnya yang telah mengalami penyiksaan dan trauma perang. Dengan cara ini

jumlah orang yang dapat dilayani oleh CVT bisa ditingkatkan, pada saat bersamaan dapatlah dicetak sejumlah kader paraprofesional kesehatan mental berkualitas di dalam komunitas yang sebelumnya tidak memiliki pelayanan kesehatan mental. Paraprofesional tersebut melakukan banyak tugas profesional, walau masih terus berada di dalam sistem pengawasan.

Perang saudara dan konflik sipil di Afrika Barat telah membinasakan sejumlah besar penduduk dan menggiring begitu banyak orang ke dalam kamp-kamp pengungsian, di mana sebuah organisasi internasional seperti CVT tidak akan mungkin dapat membawa cukup banyak staf guna memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan mental. Sebagai gantinya CVT memutuskan untuk menarik sumber daya dari dalam kamp-kamp tersebut, yang pada akhirnya berhasil merekrut lebih dari 120 orang pengungsi sebagai mitra konselor atau agen psikososial (*psychosocial agents*—PSAs) di sekian banyak kamp pengungsian di Guinea dan Sierra Leone.

Kamp-kamp pengungsian menyediakan sebuah area khusus untuk *penyintas* yang membutuhkan pendampingan, sebagaimana juga sebuah lokasi yang baik untuk supervisi langsung yang berlangsung cukup lama serta pelatihan-pelatihan yang disyaratkan untuk dapat mendampingi para *penyintas* penyiksaan. Banyak dari PSAs menerima hingga empat tahun pelatihan secara terus-menerus dan pengawasan harian sebelum program ini bisa masuk ke dalam komunitas tempat kekejaman berlangsung.

Pelatihan secara dekat yang intensif dalam model CVT mengombinasikan psikotripsi Barat dengan pemahaman lokal mengenai trauma dan pemulihan. Program ini dimulai dengan sesi pelatihan selama dua minggu, diikuti dengan waktu pelatihan selama sehari penuh tiap bulan dan sesi pelatihan selama tujuh hari setiap tiga bulan sekali. Sesi-sesi ini berfokus pada teori trauma, psikologi umum, konseling, dan ketrampilan berkomunikasi. Psikolog CVT dan pekerja sosial bekerja harian di kamp-kamp, mencontohkan perilaku dan membantu PSAs melatih ketrampilan mereka. Dalam pekerjaannya, PSAs menghabiskan waktu sepuluh minggu mengobservasi profesional kesehatan mental memfasilitasi kelompok-kelompok terapi, sepuluh minggu mengkofasilitasi dan sepuluh minggu memimpin sendiri sebuah kelompok dengan pengawasan periodik. Pada akhir masa pelatihan mereka, PSAs telah benar-benar ahli mengenai efek-efek dari trauma dan dalam memfasilitasi pemulihan trauma serta evaluasi program. Mereka juga merupakan fasilitator kelompok yang trampil dan komunikator yang efektif.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di

situs web <www.newtactics.org> di bawah *Tools for Action*.

Pada dasarnya, CVT menggunakan taktik ini untuk membantu komunitas menyembuhkan dirinya sendiri. Para pengungsi yang berlatih sebagai PSAs mengalami pemberdayaan ketika mereka sendiri mempelajari ketrampilan baru dan melakukan sesuatu yang positif bagi komunitas mereka. Orang-orang yang mereka layani melihat bahwa seseorang dari komunitas mereka sendiri, —dan bukannya orang asing dari luar, berada dalam kapasitas untuk membantu mereka. Dan bersamaan dengan itu, orang-orang di dalam kamp pengungsian menerima perawatan kesehatan mental yang mereka butuhkan.

Sementara taktik ini telah diterapkan di sini untuk membantu korban dari penyiksaan dan trauma perang, ini dapat juga digunakan untuk melayani penduduk lain dalam jumlah besar yang juga telah diterpa oleh kekerasan yang masif.

*Apakah pembentukan kader paraprofesional
—dalam hal penyediaan obat-obatan,
kesehatan mental dan kesehatan publik—
akan memainkan peran menentukan dalam kerja Anda?
Bagaimana Anda bisa mengembangkan kapasitas ini?*

Menyambut Tentara Anak Kembali ke Rumah: Mengombinasikan teknik penyembuhan tradisional dan Barat untuk mengintegrasikan kembali tentara anak dengan komunitas mereka

Tentara anak adalah korban, tetapi seringkali mereka adalah pelaku pelanggaran juga. Beberapa telah dipaksa untuk melakukan kejahatan yang menakutkan, terkadang terhadap komunitas dan keluarga mereka sendiri. Ini tidak hanya menyebabkan kerusakan psikologis yang mengerikan, tetapi dapat membuatnya luar biasa sulit bagi keluarga dan komunitas mereka untuk menerima mereka kembali. Di Mozambique, sebuah kelompok telah menggunakan taktik yang membutuhkan kolaborasi dan kepercayaan besar di antara tentara anak, komunitas dan para pemuka adat serta para penyembuh. Dukungan proses pemulihan secara keseluruhan memang amat penting untuk membantu komunitas mengintegrasikan-ulang anak-anak mereka kembali kepada kehidupan komunitas.

Reconstruindo a Esperança (Membangun Kembali Harapan), di Mozambique, mengombinasikan metode penyembuhan tradisional dengan psikologi Barat untuk mereintegrasikan mantan tentara anak. Ribuan anak telah digunakan sebagai serdadu oleh kedua kubu yang bertikai dalam perang saudara yang fatal di Mozambique. Lucrecia Wamba, seorang psikolog yang bekerja pada *Rebuilding Hope*, menyatakan bahwa “tentara anak hidup melalui kengerian yang tak terbayangkan dan mereka menjalani pengalaman ini melalui lensa budaya dan sistem kepercayaan komunitas mereka. Pemulihan mereka juga harus berproses melalui lensa yang sama, dalam upaya untuk meraih rehabilitasi individual maupun reintegrasi komunitas.” Organisasi itu mengakui bahwa baik metode pemulihan tradisional maupun psikologi Barat yang bergerak sendiri-sendiri tidak akan memadai untuk mengatasi kebutuhan anak-anak ataupun komunitas.

Pertama-tama *Rebuilding Hope* melakukan survei untuk mengidentifikasi komunitas yang menghadapi masalah dengan reintegrasi tentara anak, serta untuk mengidentifikasi sumber daya komunitas. Menyadari bahwa para penyembuh tradisional seringkali adalah orang pertama yang didekati oleh anggota komunitas ketika membutuhkan pertolongan, psikolog *Rebuilding Hope* mengkondisikan dukungan dari para pemimpin komunitas guna membangun hubungan baik dengan para penyembuh.

Di dalam komunitas yang bersangkutan, para psikolog memeriksa peran proses penyembuhan tradisional dalam mempromosikan rekonsiliasi dan reintegrasi, serta mendekati pihak keluarga-keluarga untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Pada awalnya, pihak keluarga enggan untuk mempercayai pihak luar, karena mengkhawatirkan bahwa anak mereka akan diambil lagi dari diri mereka. Para psikolog juga mendatangi para pemimpin lokal untuk menjelaskan efek-efek trauma, serta menanyakan apakah mereka melihat problem-problem tertentu di antara tentara anak yang kembali pulang dan apakah mereka dapat mengatasi problem-problem tersebut. Ketika para pemimpin mengakui bahwa problem-problem tersebut berkelanjutan, para psikolog menawarkan diri untuk bekerja secara kolaboratif dengan para penyembuh tradisional.

Para pemimpin lokal mendampingi para psikolog dalam kunjungan kepada para penyembuh untuk mendorong kerja sama. Para psikolog dan para penyembuh menyadari bahwa pendekatan mereka dapat saling melengkapi. Untuk membangun kepercayaan di dalam komunitas, *Rebuilding Hope* juga perlu bekerja sama dengan komunitas untuk mengidentifikasi prioritas material dan mendapatkan bantuan material, untuk menghubungkan komunitas kepada sumber daya seperti perumahan, pendidikan dan peralatan pertanian.

Hasilnya adalah sebuah pendekatan untuk pemulihan yang terintegrasi dimana para penyembuh dan para psikolog membangun hubungan kolaboratif, menawarkan kesempatan kepada setiap anak untuk meraih hasil terbaik yang dimungkinkan.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di situs web <www.newtactics.org>, di bawah *Tools for Action*.

Mantan tentara anak menghadirkan timbunan problem kompleks ke dalam komunitas yang—secara menyedihkan—tidaklah merupakan permasalahan khas bagi Mozambique saja. Taktik ini sangat mungkin diterapkan dalam komunitas lain yang tengah bekerja untuk mereintegrasikan para *penyintas* perang, komunitas di mana para pemimpin dan penyembuh tradisional dapat memainkan peran signifikan, di mana orang-orang yang terkena pelanggaran serta para pelaku pelanggaran perlu kembali hidup bersama pasca perang. Agar bisa sembuh, sebuah komunitas harus mengatasi asumsi absolut bahwa para pelaku pelanggaran adalah sedemikian jahat dan tidak akan lagi dapat direintegrasikan ke dalam masyarakat dalam cara yang positif atau bermakna apapun. Di sisi lain minimnya sumber daya yang andal dapat menjadikan taktik ini sulit diimplementasikan, khususnya jika anggota-anggota komunitas merasa bahwa sumber daya semacam itu lebih baik digunakan untuk membantu korban, ketimbang bekerja bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran.

*Kami mendatangi tiap penyembuh
dengan didampingi pemuka perempuan dari komunitas itu.
Pemuka itu adalah akses kami kepada para penyembuh tradisional.
Dialah yang mula-mula berbicara dan menjelaskan maksud kami
untuk menolong.
"Mereka adalah dokter," katanya, "Mereka ada di sini untuk
membantu.
Aku membawanya karena kupikir mereka memiliki sesuatu bagi kita.
"Para penyembuh kemudian akan menceritakan kepada kami
apa yang tengah mereka lakukan kepada anak-anak itu
dan kami menjelaskan proses edukasional menurut disiplin kami,
berfokus pada anak-anak dan pada komunitas pada umumnya.
Kami merasa bahwa kami dapat bekerja sama.
Jika para penyembuh itu berhasil mengusir roh-roh jahat itu,
maka kemudian anak-anak itu dapat datang kepada kami,
dan kami dapat membantu membentuk mereka
agar siap beranjak menjadi manusia— pria dan perempuan—
dewasa yang sehat.*

*Lucrecia Wamba
Rebuilding Hope, Mozambique*

Lingkaran Penciptaan Perdamaian: Melibatkan komunitas dalam menentukan hukuman bagi pelaku pelanggaran dan membantu merehabilitasi mereka

Jarang sekali kelompok korban dan para pelaku pelanggaran memiliki kesempatan untuk duduk bersama dan mendiskusikan sebuah kejahatan, sedemikian rupa untuk memungkinkan komunitas pulih serta untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. Dalam komunitas suku-suku asli di Amerika Serikat dan Kanada, sebuah tradisi yang telah ada selama berabad-abad tengah diadaptasikan untuk menghadapi berbagai problem keadilan kontemporer.

Lingkaran-lingkaran penciptaan perdamaian menggunakan ritual dan struktur lingkaran tradisional untuk menciptakan ruang terhormat di mana semua anggota komunitas yang berkepentingan—korban, pendukung korban, pelaku pelanggaran, pendukung pelaku pelanggaran, hakim, penuntut, pengacara pembela, polisi, pekerja pengadilan—dapat bicara secara terbuka dalam sebuah upaya bersama untuk memahami sebuah kejahatan, untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan guna menyembuhkan segenap pihak yang terluka dan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Lingkaran ini dibangun dalam tradisi lingkaran-lingkaran penutur (*talking circles*), yang lazim di kalangan suku-suku asli Amerika Utara, di mana sebuah obyek yang disebut lembar pembicaraan (*talking piece*) diedarkan dari satu peserta ke peserta lainnya di dalam sebuah lingkaran guna menstrukturkan sebuah dialog.

Lingkaran-lingkaran penciptaan perdamaian merupakan proses yang diarahkan oleh komunitas yang bekerja secara kolaboratif dengan sistem hukum pidana setempat. Secara khas lingkaran-lingkaran ini melibatkan prosedur berlangkah majemuk (*multi step procedures*) yang mencakup penyertaan pelaku pelanggaran ke dalam proses lingkaran, lingkaran penyembuhan bagi korban, lingkaran penyembuhan bagi pelaku pelanggaran, lingkaran penghukuman untuk mengembangkan konsensus mengenai elemen-elemen kesepahaman penghukuman, serta lingkaran tindak lanjut untuk memantau kemajuan pelaku pelanggaran. Rencana penghukuman dimungkinkan untuk menginkorporasikan komitmen dari sistem yang ada, serta komitmen dari para anggota komunitas, keluarga maupun para pelaku pelanggaran itu sendiri.

Selama sesi pertemuan-pertemuan lingkaran, para partisipan duduk di dalam sebuah lingkaran tanpa meja atau perabot lainnya. Lingkaran difasilitasi oleh “para penjaga” (“keepers”), lazimnya adalah para anggota komunitas terlatih, yang bertanggungjawab membentuk suasana saling hormat serta pengharapan, yang

mendukung dan menghormati setiap partisipan. Partisipan hanya diperkenankan berbicara ketika memegang lembaran pembicaraan, lembar ini diedarkan searah jarum jam di sekitar lingkaran untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap partisipan. Karena ia menunjukkan siapa yang akan bicara dan siapa yang harus mendengarkan, lembar pembicaraan mengurangi peran fasilitator dan menghilangkan peluang interupsi. Lembar ini juga menciptakan ruang dan kesempatan bagi partisipan yang lazimnya mengalami kesulitan untuk melibatkan diri secara aktif dalam suasana dialog yang biasa. Setiap partisipan didorong untuk menambahkan pemahaman baru mengenai permasalahan dan didorong pula untuk mengajukan kemungkinan-kemungkinan solusi.

Mula-mula proses ini mungkin melibatkan lingkaran terpisah antara korban dan pelaku pelanggaran, di mana para partisipan menentukan sebuah rencana tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dimunculkan di dalam proses. Melalui konsensus bersama, lingkaran dimungkinkan untuk mengembangkan hukuman terhadap pelaku pelanggaran dan mungkin pula menetapkan tanggungjawab bagi anggota komunitas dan pejabat keadilan. Setelah rampungnya proses lingkaran tersebut, komunikasi reguler dan evaluasi digunakan untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan kesepakatan dengan kondisi-kondisi baru yang telah berubah.

Lingkaran penciptaan perdamaian adalah sebuah cara di mana orang dari berbagai perspektif berbeda dapat hadir bersama untuk menyelenggarakan percakapan yang sulit mengenai konflik, rasa sakit dan kemarahan, seraya menciptakan ruang untuk menghormati kehadiran dan martabat setiap partisipan. Di samping untuk mendukung korban dan membantu pelaku pelanggaran untuk melakukan perubahan hidup, lingkaran penciptaan perdamaian juga digunakan untuk mengembangkan rencana bagi keluarga-keluarga yang tengah dilanda dalam krisis, menyelesaikan konflik di sekolah maupun di tempat kerja serta menjembatani kesenjangan antar budaya dan generasi.

Lingkaran seperti ini tidak selalu cocok untuk semua pelaku pelanggaran.

Hubungan antar pelaku pelanggaran dengan komunitas, ketulusan dan tekad pelaku pelanggaran untuk disembuhkan, serta masukan dari korban dan dedikasi dari kelompok pendukung pelaku pelanggaran, amat menentukan apakah sebuah kasus cocok untuk diproses dalam lingkaran.

Karena komunitas-komunitas bervariasi dalam hal kapasitas dan kesehatan untuk menghadapi berbagai perbedaan atau konflik secara konstruktif, maka sistem hukum formal juga berpartisipasi

dalam lingkaran penghukuman komunitas,
guna melindungi korban
serta pelaku pelanggaran
dari tanggapan tidak proporsional
ataupun
ketidakseimbangan kekuasaan
di dalam komunitas.

Kay Pranis

Pelatih Lingkaran, Amerika Serikat

Menuturkan Cerita secara *Online*: Menciptakan ruang pertemuan di internet bagi mantan tentara anak untuk berbagi cerita dan mengembangkan ketrampilan baru

Teknologi baru menyediakan kesempatan untuk membangun kesadaran mengenai pelanggaran HAM. Diluncurkan pada tahun 2000, *Child Soldier Project of the International Education and Resource Network—iEarn Sierra Leone* (*Project* Tentara Anak dari Jaringan Pendidikan dan Sumber Daya Internasional) di Sierra Leone telah menciptakan sebuah situs web tempat para mantan tentara anak dapat berbagi kisah mereka. Situs web yang terletak di <www.childsoldiers.org>, memuat berbagai esai, puisi, karya seni dan suara mantan tentara anak serta menawarkan sebuah forum *online* untuk diskusi.

iEarn Sierra Leone mengunjungi sekolah-sekolah, rumah sakit dan kamp-kamp, menyiarkan program radio dan menerbitkan artikel-artikel surat kabar untuk menginformasikan kepada tentara anak mengenai *project* tersebut. Para partisipan diajari membaca dan menulis, penggunaan program dasar pemrosesan kata menggunakan komputer dan ketrampilan komputer umum. Mereka juga menerima pendampingan trauma dari perawat dan psikiater relawan.

Ketika partisipan sudah merasa lebih nyaman dengan komputer, mereka menggunakan situs web berbagi pemikiran dan pengalaman mereka. Galeri riwayat hidup, gambar dan suara mantan tentara anak mendorong dukungan dan solidaritas dari orang-orang di seluruh penjuru dunia. Sebuah forum interaktif telah memungkinkan partisipan untuk berdiskusi dan berdebat dengan teman-teman mantan tentara anak dan yang lainnya. Para partisipan membangun rasa percaya diri dan mempelajari ketrampilan-ketrampilan yang memudahkan mereka untuk menciptakan sebuah tempat bagi diri mereka sendiri dalam masyarakat. Hingga

saat ini, lebih dari 200 mantan tentara anak telah berpartisipasi dalam *project* tersebut.

Taktik menggunakan internet untuk membantu kelompok korban yang terpencar-pencar membagikan cerita mereka dan berhubungan satu dengan yang lainnya ini dapat digunakan dalam kasus lain di mana korban pelanggaran terpencar-pencar atau di mana minoritas yang menjadi target (misalnya para penyandang cacat atau kelompok *gay* dan lesbian) tidak dapat berbincang mengenai pengalaman mereka secara langsung, semudah di dalam komunitas mereka sendiri. Internet dapat menciptakan sebuah ruang yang cukup aman bagi orang-orang ini untuk berhubungan dengan pihak-pihak lainnya yang akan dapat memahami mereka. Akan tetapi harus diakui pula bahwa tidak selalu mungkin, untuk menjamin anonimitas atau keamanan dari informasi personal 100% di internet.

Taktik ini jelas menuntut infrastruktur teknologi yang memadai, tetapi dengan keberhasilannya di Sierra Leone—sebuah negeri yang telah diporak-porandakan perang dan salah satu yang termiskin di dunia—*iEarn* telah membuktikan bahwa hambatan ini dapat diatasi.

***Bagaimana Anda dapat memungkinkan orang-orang
untuk menuturkan kisah mereka?***

*Anak-anak, sejumlah di antaranya berbakat
dalam berbagai bentuk seni,
dapat menemukan kembali talenta mereka,
yang membuat mereka percaya
bahwa hidup mereka dapat diperbaiki.
Lagu-lagu, karya seni dan musik mereka,
sebagaimana juga tanggapan luar biasa yang mereka terima
dari rekan-rekan sebaya mereka,
menjadi pendorong bagi keadilan sosial
dan perubahan yang bersifat positif.*

*Andrew Benson Greene
childsoldiers.org,
Sierra Leone*

Membawakan Harapan bagi Anak: Mengorganisir kemah musim

panas untuk memberikan jeda kekerasan bagi anak

Di *West Bank*¹² sebuah kelompok berupaya mengatasi problem trauma anak-anak di bawah pendudukan militer dengan cara memberikan kesempatan bagi mereka untuk berhubungan dengan anak-anak lainnya dalam sebuah lingkungan yang penuh kedamaian.

Treatment and Rehabilitation Center for Victims of Torture—TRC (Pusat Perawatan dan Rehabilitasi bagi Korban Penyiksaan) di Ramallah, West Bank, mengorganisir sebuah kemah musim panas gratis untuk merehabilitasi anak-anak yang mengalami trauma. Kemah ini menawarkan kegiatan-kegiatan rekreatif, artistik dan rehabilitatif yang dimaksudkan untuk membantu anak-anak untuk saling mendukung satu sama lain dan menghadapi trauma serta rasa takut personal mereka.

Pihak militer Israel telah menduduki *West Bank* sejak 1967 dan kekerasan yang terus berlanjut di daerah tersebut telah merusak secara psikologis seluruh penduduk Palestina, menciptakan sebuah kultur yang didominasi oleh kekerasan. Terlahir ke dalam kondisi hidup yang penuh penindasan dan tekanan, kebanyakan anak-anak di *West Bank* telah menyaksikan berbagai kekejaman.

TRC mendirikan kemah musim panasnya untuk mengurangi beberapa penderitaan yang dihadapi anak-anak ini dan menyediakan sebuah situasi untuk perawatan rehabilitatif. TRC mempromosikan kemah di desa-desa yang dekat, di kamp-kamp pengungsian dan di antara klien-kliennya. Kebanyakan anak-anak yang dipilih (sekitar 60-70) menderita beragam gejala kecemasan, depresi atau kesepian, dikarenakan rentannya mereka terhadap trauma; banyak di antaranya yang telah menyaksikan kematian atau penyiksaan langsung anggota-anggota keluarganya.

Kemah musim panas diadakan setiap hari selama empat hingga lima jam selama periode waktu tiga hingga empat minggu. Transportasi disediakan menuju dan dari kemah itu dan seringkali kemah itu terletak dekat dengan tempat tinggal anak-anak tersebut. Anak-anak yang berpartisipasi dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan level atau jenis trauma yang telah mereka derita. Setiap anak memiliki seorang mentor untuk mendampingi, mendengarkan, memberi nasihat dan mengintegrasikan mereka ke dalam kelompok anak-anak lainnya. Setiap anak juga memiliki akses kepada seorang psikiater, psikolog dan pekerja sosial. Tiga hari

12 Daerah yang diduduki oleh negara Israel. Dahulu lebih dikenal sebagai Judea-Samaria atau ‘perbukitan Judea sebelah barat Sungai Yordan’. Sebutan *West Bank* mengacu pada batasan geografis ini. Diolah dari berbagai sumber (eds.).

pertama dan tiga hari terakhir dari kemah musim panas itu biasanya didedikasikan untuk beberapa *project* seperti menggambar, membuat karya seni dan olah raga. Sisa hari-hari lainnya difokuskan pada kerja kelompok, seperti dinamika kelompok dan konseling, bermain serta terapi seni. Laporan medis dan perilaku ditetapkan dalam upaya untuk mengevaluasi dampak kemah terhadap setiap anak.

Berdasarkan lembar evaluasi yang diisi oleh orangtua dan konselor, banyak anak meninggalkan kemah dengan gejala kecemasan yang lebih sedikit, perilaku kekerasan yang lebih sedikit dan lebih terbuka serta lebih terintegrasi ke dalam komunitas mereka. Selama *project* menggambar, anak-anak diminta untuk membuat gambar yang menampilkan lingkungan mereka atau harapan akan masa depan. Yang sering terjadi, gambar-gambar awal memotret citra dan warna-warna yang gelap. Akan tetapi, gambar-gambar akhir menunjukkan perubahan dalam sikap dan harapan mengenai masa depan.

Kemah ini memberi kesempatan bagi anak-anak untuk melangkah keluar sebentar dari kekerasan kehidupan harian mereka dan mengeksplorasi cara-cara yang berbeda dalam menghadapi trauma tanpa menggunakan kekerasan itu sendiri. Kamp itu juga menawarkan sebuah pembebasan bagi anak-anak, sebuah tempat di mana mereka dapat datang untuk mengekspresikan diri mereka melalui beragam permainan dan seni, sementara pada saat yang sama menerima pelayanan rehabilitatif.

Kepemilikan Lokal atas Sejarah: Mendokumentasikan kesaksian lisan untuk menciptakan sejarah tertulis guna membantu komunitas terisolasi memahami dampak kejahatan perang yang diderita mereka

Secara tradisional sejarah memang ditulis oleh mereka yang berkuasa. Para korban pelanggaran HAM—apakah komunitas miskin atau kaum sipil yang terperangkap di tengah terpaan perang saudara—jarang sekali dimintakan pendapat, bahkan lama setelah pelanggaran tersebut berakhir. Sebuah kelompok di Guatemala memfasilitasi komunitas-komunitas terisolasi yang telah diporandakan oleh perang, ke dalam proses penulisan sejarah perang tersebut. Hasil konkret dari kerja tersebut adalah sebuah laporan tertulis, namun penyusunan laporan itu sendiri dapat merintis proses rekonsiliasi di tingkat lokal. Dengan caranya yang tersendiri, *project* ini berhasil memberikan suara bagi orang-orang yang selama ini telah dibisukan.

Sebagai bagian dari *Project REMHI* (*Recovery of Historical Memory* atau Pemulihan Ingatan Historis) yang tengah berjalan, beberapa diosis (*dioceses*) Gereja Katolik di Guatemala memobilisasi anggota mereka untuk menghimpun kesaksian para korban kekerasan negara. Kesaksian-kesaksian ini kemudian dikompilasikan di dalam sebuah laporan yang dipergunakan untuk mengembalikan sejarah itu kepada komunitas dan individu yang paling terkena dampak kekerasan.

Selama 36 tahun perang saudara Guatemala, hampir 200.000 orang dibunuh, dihilangkan atau didera berbagai penderitaan maupun berbagai bentuk pelanggaran HAM lainnya, terutama oleh kekuatan keamanan negara. *Project REMHI* dimulai di tahun 1994—satu tahun sebelum perjanjian perdamaian di tahun 1995—sebagai inisiatif dari Kantor Hak Asasi Manusia Keuskupan Guatemala, di bawah kepemimpinan Uskup Juan Gerardi. Sementara sebuah Komisi Kebenaran telah dijanjikan (sebagai bagian dari paket perjanjian perdamaian yang lebih awal) tidak kunjung dibentuk secara konkret, banyak kalangan masyarakat sipil memandang bahwa Komisi Kebenaran resmi tersebut tidak akan dapat memenuhi pengharapan korban, dikarenakan perbedaan cara memandang sejarah dan akar kekerasan yang sedemikian ekstrem, serta beratnya tingkat kekerasan yang telah diderita masyarakat.

Oleh karena itu REMHI memutuskan untuk menggunakan struktur gereja dan jaringan-jaringan dari berbagai kalangan terkait untuk membuka ruang dialog mengenai kekerasan, serta memfasilitasi kerja bagi Komisi Kebenaran yang akan datang. Gereja mempublikasikan *project* itu melalui poster, selebaran dan pengumuman radio. Setiap paroki yang menyatakan kesediaan berpartisipasi harus menominasikan dua orang anggota jemaat gerejanya sebagai “fasilitator rekonsiliasi”. Pendekatan REMHI ini cukup berbeda dari berbagai upaya rekonsiliasi sejenisnya. Di REMHI yang pertama kali dimobilisasi adalah sumber daya dari kalangan akar rumput, yakni para anggota komunitas sendiri—khususnya para korban kekerasan—yang justru dipercayakan untuk berperan sebagai fasilitator. Dari seluruh negeri, hampir sekitar 800 orang fasilitator berhasil terhimpun untuk menganalisis kesaksian dari 5.000-7.000 orang yang telah menderita kekerasan, penyiksaan atau kehilangan anggota keluarga. Karena praktik-praktik kekerasan itu masih terus berlangsung, kerja-kerja pengumpulan kesaksian tersebut membawa resiko yang begitu besar; tidak hanya bagi gereja, namun juga bagi siapa saja yang terlibat dalam *project* ini.

Analisis atas berbagai kesaksian yang ada menunjukkan, bahwa kekuatan keamanan negara sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas mayoritas pelanggaran HAM selama perang saudara. Laporan final *Project REMHI* itu

sendiri akhirnya rampung dan diberikan judul, *Guatemala: Never Again*. Laporan selengkapnya yang terdiri dari empat jilid tebal ini, diumumkan ke hadapan publik pada tanggal 24 April 1998. Secara tragis, Juan Gerardi selaku penggagas REMHI dibunuh hanya dua hari semenjak publikasi atas laporan final tersebut. Di kemudian hari terungkap bahwa personil militerlah yang bertanggungjawab atas pembunuhan tersebut.

Kendati insiden kematian menimpa Gerardi, sekian banyak mantan fasilitator REMHI tersebut terus berkiprah melanjutkan *project* tersebut. Mereka membawakan kembali laporan final dari *project* tersebut kepada komunitas-komunitas yang telah berpartisipasi, dengan demikian membantu menempatkan pengalaman individual dan komunitas ke dalam konteks historis dan nasional. Ketika terjemahan laporan final REMHI rampung disusun dalam bahasa lokal, para partisipan diberikan salinan versi populer laporan itu, untuk dibacakan keras-keras dalam berbagai diskusi kelompok di komunitas. Dari laporan itu mereka belajar memahami peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya terjadi atas diri mereka dan bahwa kesemua penderitaan tersebut sama sekali bukanlah akibat kesalahan mereka; bahwasanya kebiadaban masif itu menimpa begitu banyak orang lainnya di seluruh pelosok negeri. Para fasilitator juga membantu komunitas dalam mewujudkan rekonsiliasi, memberikan sumbangan dalam pembentukan kultur perdamaian, dengan memperkenalkan metode-metode non-kekerasan dalam penyelesaian konflik. Proses ini terjadi bersamaan dengan proses ekshumasi dan penguburan kembali jasad-jasad korban, yang merupakan bagian penting dalam proses pemulihan menurut tradisi suku Maya. REMHI juga berhasil menyediakan sumbangan teramat penting bagi kerja-kerja Komisi Kebenaran resmi Guatemala (CEH atau Komisi Klarifikasi Sejarah),¹³ dengan menghadirkan saksi-saksi dan melibatkan partisipasi berbagai organisasi komunitas dalam memberikan kesaksiannya.

Taktik REMHI dapat dipergunakan untuk memfasilitasi atau memberikan kontribusi bagi kerja-kerja Komisi Kebenaran di negeri lain, atau dapat pula dipraktikkan dalam absennya Komisi Kebenaran resmi, atau ketika masyarakat korban yang paling diporak-porandakan oleh praktik-praktik pelanggaran HAM tidak diperkenankan berpartisipasi dalam proses seperti Komisi Kebenaran maupun pengadilan.

13 Baru di tahun 1999 Komisi Kebenaran resmi Guatemala (CEH—*Comisión para el esclarecimiento Histórico* atau Komisi Klarifikasi Sejarah) akhirnya sungguh-sungguh dibentuk juga, setelah REMHI menyelesaikan mandat kerjanya dan ketika masyarakat sipil dan kelompok korban telah terlebih dulu menghimpun data-data pelanggaran HAM (eds.).

Di Guatemala taktik ini bisa cukup efektif sebagian karena adanya faktor dukungan struktur dan jangkauan institusional yang cukup ekstensif dari Gereja Katolik. Tanpa adanya jaringan perintis yang dapat dipercaya akan sulit untuk menghimpun kesaksian-kesaksian personal dalam skala yang begitu besar. Walau persoalan pendanaan juga perlu dipertimbangkan, namun dalam kasus Guatemala, sumber daya finansial ternyata justru amat terbatas dan beban kerja didistribusikan di antara masing-masing komunitas secara mandiri.

Taktik ini dapat pula menuai resiko. Banyak kalangan pelanggar HAM yang berada dalam posisi berkuasa di tubuh militer maupun pemerintahan, serta kelompok-kelompok paramiliter atau militer sendiri, yang menanggapi taktik ini dengan penuh ancaman dan bahkan melancarkan pembunuhan terhadap siapa saja yang dianggap berkaitan dengan *project* tersebut.

Bagaimana orang-orang di komunitas lokal dapat dilibatkan secara aktif dalam project rekonsiliasi yang tengah Anda tangani?

Mengupayakan Pemulihan

Ketika kejahatan-kejahatan berskala besar telah dilakukan, apakah akan pernah mungkin untuk memberikan kompensasi kepada korban secara adil dan memadai? Bisakah tindakan penghukuman atas para pelaku kejahatan—(dengan sendirinya)—membantu menyembuhkan luka para korban atau sungguh-sungguh mencegah kejahatan serupa di masa mendatang? Dapatkah pengadilan membantu memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut? Akan mencukupikah uang yang diberikan untuk kompensasi atas kejahatan-kejahatan ini? Kesemuanya ini adalah permasalahan-permasalahan sukar dan rumit, yang tengah terus dicarikan jawabannya oleh masyarakat internasional. Taktik-taktik di dalam bagian ini semuanya berupaya membawakan sebetulnya keadilan pasca kejahatan HAM, apakah dengan mengupayakan penghukuman bagi para pelaku kejahatan atau menyediakan kompensasi bagi korban atau dengan membongkar struktur-struktur kultural dan institusional yang terus memberikan impunitas bagi para pelaku.

Kasus-kasus hukum melawan pelaku pelanggaran HAM yang berat—mereka yang diduga telah melakukan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan—biasanya adalah urusan yang sangat kompleks.

Penanganan atas kasus-kasus ini mensyaratkan berbagai faktor dapat hadir dan bekerja sama secara sinergis erat di level yang mendekati sempurna. Seyogianya terdapat struktur hukum nasional atau internasional yang mendukung, termasuk perjanjian, ratifikasinya serta Undang-Undang terkait; harus pula tersedia bukti-bukti memadai; harus terdapat sebuah mekanisme untuk menjerat terdakwa dan secara fisik menghadapkannya ke pengadilan; seringkali harus terdapat perjanjian ekstradisi dan mekanisme yang cocok antar negara. Ketika kasus seperti ini sungguh terjadi, maka biasanya kasus ini memiliki sifat yang luar biasa, maka ada banyak hal yang mesti dipelajari darinya mengenai bobot konvensi, perjanjian, struktur hukum internasional, serta peran komunitas internasional dalam mencegah dan memulihkan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi.

Seringkali kasus-kasus di hadapan pengadilan ini tidak melulu mengenai penghukuman terhadap pelaku kejahatan HAM tertentu, akan tetapi membawakan pesan bahwasanya kejahatan HAM tidak akan pernah ditoleransi, bahwasanya masyarakat kita menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Aksi menentang berbagai bentuk ketidakadilan dapat pula terjadi sepenuhnya di luar struktur-struktur hukum resmi. Para pegiat HAM kini telah menemukan banyak cara kreatif untuk menyorot kejahatan HAM dan menegakkan akuntabilitas terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

Yang Pertama dalam Keadilan Internasional: Menerapkan hukum internasional atas diktator yang melakukan perjalanan ke luar negeri

Penangkapan dan ekstradisi terhadap mantan diktator Chile Augusto Pinochet adalah satu di antara kasus hukum yang paling luar biasa. Kasus ini membentuk sebuah preseden yang dapat dipergunakan di waktu mendatang untuk menyeret kepala negara maupun mantan kepala negara, atas nama keadilan internasional.

Dalam kasus ini pemerintah Spanyol dan Inggris menggunakan hukum internasional maupun hukum nasional, untuk menetapkan bahwa mantan diktator Chile Augusto Pinochet dapat dihadapkan ke sidang pengadilan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang diperbuatnya selama berkuasa.

Di tahun-tahun awal kediktatoran Pinochet (1973-1990), para aktivis HAM sudah mulai mendokumentasikan kasus-kasus penahanan paksa, pemindahan paksa, pembunuhan, penyiksaan dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh aparaturs kekuasaan Pinochet. Setelah demokrasi dipulihkan di Chile, sebuah Komisi Kebenaran dibentuk untuk mengompilasikan informasi rinci mengenai sekitar 3.000 kasus pelanggaran HAM. Akan tetapi di bawah Undang-Undang yang berlaku di Chile, Pinochet sendiri tidak dapat dihadapkan ke pengadilan, sebab sebelum meninggalkan kekuasaannya ia telah memberikan perlindungan konstitusional dari kemungkinan penuntutan terhadap dirinya sendiri dan sebagian besar antek-anteknya.

Dalam kondisi inilah para pengacara—yang bertindak sebagai kuasa hukum atas nama rakyat Chile yang hak-hak asasi manusianya telah dirampas oleh pemerintahan Pinochet—mendaftarkan pengaduan tindak pidana di Spanyol dengan menggunakan sebuah upaya hukum yang disebut sebagai '*accion popular*' (terjemahan harfiah: 'aksi rakyat'), di mana warga negara Spanyol diperkenankan untuk mengadukan tindakan-tindakan pidana perorangan dalam situasi tertentu. Pengadilan Spanyol memperbolehkan kasus itu untuk diteruskan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*), yang memungkinkan kasus-kasus yang terkait—penyiksaan, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya—disidangkan di pengadilan Spanyol, dengan tidak mempedulikan tempat dilakukannya kejahatan tersebut, juga tanpa memandang kewarganegaraan dari pihak pelaku pelanggaran maupun pihak korban.

Surat perintah penangkapan dari pengadilan Spanyol kemudian dikeluarkan dan berdasarkan inilah Pinochet ditangkap oleh pihak berwenang Inggris di kota London, tempat ia tengah berkunjung. Pinochet dan para pembelanya menentang surat perintah penangkapan tersebut dengan argumen bahwa sebagai mantan kepala negara ia memiliki kekebalan dari penangkapan dan ekstradisi. Akan tetapi, *House of Lords* Inggris dua kali menolak argumen ini, mendasarkan pada aturan bahwa: pertama, walaupun seorang mantan kepala negara memiliki kekebalan atas perbuatan yang dilakukan dalam fungsinya sebagai kepala negara, namun penyiksaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah "tugas" dari seorang kepala negara; dan kedua, bahwa dikarenakan Inggris dan Chile telah meratifikasi Konvensi PBB tahun 1984 (yakni Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya), Pinochet tidak lagi dapat mengklaim kekebalan dari dakwaan mengenai tindakan penyiksaan.

Pada akhirnya Pinochet memang bisa dipulangkan kembali ke Chile untuk

alasan medis dan tidak jadi disidangkan di Spanyol. Namun Mahkamah Agung Chile kemudian melucuti kekebalan hukum yang pernah diberikan oleh dirinya sendiri. Mahkamah Agung menetapkan bahwa Pinochet harus dihadapkan ke sidang pengadilan; walaupun belakangan diputuskan bahwa kondisinya terlalu lemah (sakit) untuk dipanggil menghadap pengadilan.

Keputusan *House of Lords* Inggris menghasilkan sebuah preseden yang penting, ia menunjukkan kepada dunia bahwa seorang kepala negara tidak lagi memiliki kekebalan dari tuntutan atas dakwaan penyiksaan, bahwa kejahatan semacam ini dapat dituntut di mana pun di dunia ini di bawah prinsip yurisdiksi universal; dan bahwasanya pengadilan nasional dapat digunakan untuk memaksa negara memenuhi kewajiban di bawah hukum internasional.

Sorotan dunia internasional juga mengubah keseimbangan politik di Chile—yang tidak lagi dapat sekadar bersandar erat pada hukum nasional yang telah melindungi pelaku pelanggaran HAM, termasuk Pinochet—dari keharusan menjalani sidang pengadilan atas perbuatannya. Yang tidak kalah penting, adalah faktor penahanan berkepanjangan terhadap Pinochet di London, mengurangi rasa takut yang pernah menghantui segenap rakyat Chile, yang ternyata mulai bergerak maju dengan cara-cara baru.

Akuntabilitas bagi Perusahaan Multinasional (MNC): Menggunakan Undang-Undang nasional untuk menyeret pelaku kejahatan kemanusiaan di negeri lain ke hadapan hukum

Sebuah kelompok di Amerika Serikat menggunakan statuta federal yang telah lama berlaku untuk memungkinkan korban pelanggaran HAM di negeri lain membawa kasus hukum melawan perusahaan yang diduga terlibat dalam pelanggaran HAM.

International Labor Rights Fund—ILRF (Dana Hak Buruh Internasional) menggunakan *Alien Tort Claims Act*—ATCA (Tindak Klaim Pidana yang diajukan oleh orang Asing di Amerika Serikat) untuk mengusut kasus-kasus hukum terhadap perusahaan multinasional yang terlibat dalam pelanggaran HAM. ATCA yang dikeluarkan di tahun 1789 dan diciptakan untuk mengatasi dan mencegah pembajakan, merupakan statuta federal Amerika Serikat yang memungkinkan warga negara asing untuk memintakan tindakan hukum melawan warga negara dan perusahaan AS atas dasar pelanggaran terhadap hukum internasional. Sementara

taktik hukum telah cukup lama digunakan untuk memintakan ganti rugi (*redress*) atas pelanggaran HAM, kegunaan hukum nasional untuk pelanggaran yang diadakan di luar negeri mengindikasikan sebuah kesempatan baru bagi korban pelanggaran HAM. Taktik yang satu ini juga unik, karena fokusnya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

Banyak warga negara asing tidak memiliki pilihan untuk membawa kasus di negeri mereka sendiri. Contohnya saja, kasus ATCA pertama yang dihadapkan oleh ILRF adalah melawan perusahaan energi *Unocal* atas nama pada pengungsi Burma (berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja paksa dalam pembangunan pipa saluran minyak di Burma). Jika para pengungsi mengadukannya di Burma, mereka hampir pasti akan menghadapi pemenjaraan, penyiksaan atau kematian, karena tindakan ini akan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang penyediaan informasi mengenai pemerintahan kepada orang asing. Akan tetapi, ATCA memungkinkan warga negara asing untuk menghadapkan kasus tersebut di Amerika Serikat. Sebagai sebuah kasus untuk dipertimbangkan, harus terdapat bukti-bukti bahwa perusahaan tersebut dengan penuh rahasia terlibat dalam pelanggaran. ILRF berupaya untuk menghadirkan bukti-bukti ini.

Di samping kasus melawan *Unocal*, ILRF telah membawakan kasus melawan *Coca-Cola*, *Exxon-Mobil*, *Drummond* dan *Del Monte*. Tak satu pun dari kasus ini yang telah rampung. ATCA saat ini juga tengah dikaji oleh kantor Kejaksaan Agung Amerika Serikat, yang berupaya untuk membatasi jangkauan statuta itu.

Mekanisme pokok yang ada saat ini dalam hukum HAM internasional terutama tidak efektif dalam melawan perusahaan transnasional. Taktik ini menggunakan hukum nasional yang tersedia untuk memperluas kesempatan untuk memberikan ganti rugi (*redress*) kepada korban dari pelanggaran HAM yang paling serius. Mekanisme ini diharapkan dapat membawakan pesan kepada perusahaan transnasional bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang difasilitasi oleh pekerjaan bisnis mereka, sementara pada saat yang sama meningkatkan kesadaran di antara publik umum.

ATCA atau prosedur hukum serupa dapat digunakan oleh korban di negeri lain tempat pelanggaran tengah berlangsung atau dimana tidak ada kesempatan untuk permintaan bantuan hukum. Akan tetapi, ATCA itu sendiri seyogianya diinterpretasikan secara sempit untuk diterapkan hanya kepada pelanggaran HAM yang paling berat—genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan, pembunuhan ekstrajudisial, penyiksaan dan penahanan yang tidak berdasarkan hukum.

Adakah Undang-Undang atau pengaturan hukum di negara Anda yang mengatur tentang yurisdiksi universal? Dapatkah ini digunakan untuk menuntut akuntabilitas terhadap entitas-entitas yang ada atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi?

Menguji Pelanggaran: Ujian terhadap praktik-praktik diskriminatif

Ketika pelanggaran disembunyikan, atau diterima oleh anggota masyarakat, akan menjadi sulit bagi korban untuk membuktikan bahwa sebuah pelanggaran HAM sungguh-sungguh telah terjadi. Sebuah kelompok di Hungaria menggunakan sebuah metode pengujian untuk memberikan bukti mengenai praktik diskriminasi dan memproses kasus hukum atas nama korban.

Dengan mengadaptasi sebuah metode yang pernah digunakan oleh berbagai organisasi di Amerika Serikat atas kasus diskriminasi perumahan, *Legal Defense Bureau for National and Ethnic Minorities*—NEKI (Biro Pembelaan Hukum untuk Minoritas Etnis dan Nasional) di Hungaria menggunakan sebuah metode pengujian untuk mengumpulkan bukti ketika terdapat dugaan mengenai praktik diskriminasi. Pada tahun 2000 pengadilan Hungaria untuk pertama kali mengakui pengujian sebagai teknik yang valid untuk mendokumentasikan diskriminasi dalam sebuah kasus.

Masyarakat *gypsy*¹⁴ yang merupakan kelompok minoritas di beberapa negeri di Eropa terbentuk dari kelompok-kelompok kecil. Mereka kerap menjadi target kejahatan kebencian serta sering kali dipersalahkan atas meningkatnya angka kejahatan dan tingkat pengangguran di Hungaria. Bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi oleh orang-orang *gypsy* sampai hari ini mencakup penutupan akses untuk

14 Masyarakat *gygpsy* atau Rom (berbahasa Romani) adalah masyarakat yang berasal dari utara India, namun kini tersebar di seluruh dunia, khususnya Eropa. Kelompok-kelompok awal Rom meninggalkan India dalam migrasi secara bergelombang, diperkirakan tiba di barat Eropa sekitar abad ke-15. Pada abad ke-20 mereka telah menyebar sampai ke Amerika Utara dan Selatan, juga Australia. Dikarenakan tradisi kehidupannya yang berpindah-pindah tempat (nomad) dan termarginalisasi, jumlah populasi sesungguhnya juga tidak dapat dipastikan. Di awal abad ke-21 ini jumlah totalnya berkisar 2 sampai dengan 3 juta jiwa. Orang-orang *gypsy* atau Rom ini kerap menjadi sasaran persekusi dan diskriminasi. Pada PD II NAZI di Nazi membantai sekitar 400.000 orang *gypsy* di kamp-kamp pemusnahan massal. Sumber: Britannica Concise Encyclopedia Online <<http://www.britannica.com/eb/article-9038661/Rom>>, akses: 15 Mei 2008, 20:35 WIB.

menerima pekerjaan, perumahan dan jasa dalam akomodasi publik. Karena praktik-praktik diskriminatif ini sering kali berlangsung secara tidak kentara, tidak mudah untuk menunjukkan bukti-bukti langsung.

NEKI memanfaatkan prosedur pengujian untuk membuktikan praktik-praktik diskriminatif dan mendapatkan bukti langsung tersebut. NEKI mengidentifikasi dan melatih sejumlah orang yang dikirimkan sebagai penguji untuk meniru tindakan mereka yang mengklaim telah mengalami diskriminasi. Setiap penguji haruslah pengamat yang obyektif dan dapat diandalkan. Profil diri sang penguji juga harus semirip mungkin dengan kelompok yang mengalami diskriminasi. Dalam menyeleksi penguji, NEKI juga mengevaluasi individu-individu diharapkan akan menjadi saksi terpercaya dalam proses hukum. Karena proses pemeriksaan persidangan bisa saja berlangsung selama beberapa tahun, para penguji harus pula bersedia untuk tetap berada dalam jangkauan kontak dengan program itu untuk periode yang cukup panjang.

Ketika NEKI menerima pengaduan, staf NEKI akan menilai kasus itu dan jika mereka memutuskan untuk mengadvokasi kasus tersebut, NEKI akan mengirim penguji ke tempat yang diduga terdapat diskriminasi. Jika dugaan menyangkut pekerjaan, sebagai contoh, pengujian melibatkan pengiriman seorang *gypsy* dan seorang *non-gypsy* dengan karakteristik dan kualifikasi yang mirip, dengan etnisitas menjadi satu-satunya perbedaan utama mereka. Mereka dikirim pada interval ruang yang rapat pada hari yang sama untuk melamar pekerjaan dan penguji mengambil tindakan yang dapat diperbandingkan dalam upaya untuk membuat perbandingan menjadi jelas.

Para penguji mencatat pengalaman mereka pada lembar penugasan segera setelah pengujian, merinci pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara, perlakuan terhadap pelamar serta sifat dan cara pekerjaan tersebut dijelaskan, misalnya mengenai upah dan tunjangan. Koordinator pengujian (organisasi atau pengacara) kemudian mengevaluasi apakah ada atau tidak perbedaan perlakuan yang telah terjadi. Informasi ini sering digunakan untuk mendukung korban dalam kasus legal.

Semenjak tahun 2002, NEKI telah menggunakan taktik pengujian ini lima belas kali. Dalam tiga kasus, tidaklah mungkin untuk menyelesaikan pengujian. Dari dua belas kasus yang berhasil diselesaikan, lima tidak menghasilkan bukti mengenai diskriminasi sistematis. Akan tetapi, tujuh pengujian sisanya secara meyakinkan menunjukkan diskriminasi dan memadai untuk menjustifikasi tindakan legal.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di

situs web <www.newtactics.org>, di bawah *Tools for Action*.

Diadaptasi dari pengalaman organisasi-organisasi di AS, taktik ini jelas merupakan sesuatu yang fleksibel dan kelompok-kelompok lain di daerah itu telah mendekati NEKI untuk belajar mengenai prospek mengadopsi metode NEKI untuk masalah-masalah HAM seperti hak orang-orang cacat. Pengujian juga dapat digunakan untuk melihat pada praktik-praktik penyewaan dari sejumlah institusi, termasuk departemen kepolisian atau bisnis.

Menuntut Kompensasi: Meyakinkan pemerintah untuk memberikan kompensasi korban pelanggaran oleh polisi, militer dan personil kekuatan bersenjata

Komnas HAM di India menginvestigasi berbagai keluhan mengenai pelanggaran HAM dari masyarakat dan merekomendasikan agar pemerintah setempat menyediakan kompensasi bagi para korban.

Komnas HAM di India menanggapi keluhan-keluhan yang memiliki pembuktian kuat perihal berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dengan meminta pemerintah menyediakan kompensasi finansial bagi para korban dan memberikan hukuman yang sepadan kepada para pelakunya.

Komnas HAM tersebut dibentuk berdasarkan *Protection of Human Rights Act* (Undang-Undang Perlindungan HAM) pada tahun 1993. Komisi ini memiliki kewenangan untuk menginvestigasi dan merekomendasikan tindakan-tindakan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pelayan publik (mencakup pelanggaran secara aktif atau kelalaian dalam mencegah pelanggaran). Mayoritas keluhan yang diterima Komisi adalah berkaitan dengan tindak-tindak pelanggaran oleh aparat kepolisian; walaupun Komisi juga merekomendasikan kompensasi bagi korban pelanggaran yang dilakukan oleh pihak militer atau personil angkatan bersenjata lainnya.

Keluhan mengenai pelanggaran tersebut diterima dari para aktivis dan sumber-sumber media, serta dari korban dan kerabat mereka juga. Keluhan yang lazim termasuk pelanggaran fisik, gangguan terhadap perorangan atau keluarga, kegagalan menegakkan prosedur menyangkut perlakuan yang patut terhadap perempuan, pengabaian kondisi para tahanan, penahanan ilegal dan penyiksaan. Komisi juga menerima keluhan yang berkaitan dengan tenaga buruh anak, buruh yang dirantai atau diborgol (*bonded labor*) serta berbagai pelanggaran hak atas

anggota masyarakat yang lemah (seperti anak-anak, kaum perempuan, penyandang cacat, kasta dan suku tertentu, pengungsi, kaum minoritas dan lain-lainnya).

Setelah menerima sebuah keluhan, Komisi kemudian akan memintakan laporan penyelidikan atau mengarahkan Divisi Investigasi untuk menyelidiki kasus tersebut. Jika kasus tersebut dapat diverifikasi kebenarannya, Komisi kemudian akan menerbitkan laporan yang ditujukan kepada pemerintah negara bagian tempat terjadinya pelanggaran. Laporan itu mencakup rekomendasi kompensasi finansial bagi korban serta tindakan disipliner terhadap pelaku pelanggaran. Pemerintah negara bagian tersebut—pada gilirannya—dimungkinkan untuk membebankan biaya-biaya kompensasi kepada pelayan publik bersangkutan yang telah melakukan pelanggaran.

Komisi menerbitkan rincian kasus-kasus yang penting di dalam *newsletter* bulannya yang berjudul '*Human Rights*' serta dalam laporan tahunannya. Pihak media juga biasanya meliput kasus-kasus besar yang ditangani Komnas HAM.

Paket kompensasi dapat membantu pihak korban dan keluarganya untuk menata kembali kehidupan mereka, hanya jika ganjaran itu bersifat substansial. Di samping itu, perhatian juga harus diberikan untuk memastikan bahwa taktik ini tidak membelokkan perhatian dari keharusan reformasi di berbagai bidang lainnya. Terlepas dari segala kesulitan ini, betapapun kerja Komnas HAM India sungguh bermanfaat untuk membuat para pejabat sadar akan konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka; dengan demikian dapat menghalangi pelanggaran serupa di masa depan.

Menciptakan Komisi seperti ini menuntut dukungan substansial dari para pejabat pemerintah serta jangkauan komunitas dan/atau kampanye publik dibutuhkan untuk memastikan bahwa pihak korban dan anggota keluarga mereka mengetahui bahwa mereka dapat menggunakan permintaan bantuan ini tanpa rasa takut akan hukuman (*retribution*).

*Bagaimana Anda dapat mulai menuntut
akuntabilitas
dari badan-badan pemerintah
beserta infrastrukturnya
dan meyakinkan mereka
untuk mendukung maksud Anda?*

Mobilisasi Menentang Impunitas: Membangkitkan kesadaran publik mengenai impunitas melalui referendum atau gerakan petisi

Kadang-kadang sekalipun sudah tersedia perangkat legislatif dan pemerintahan, tapi masyarakat tidak menyadarinya atau tidak tahu cara mengaksesnya. Sebuah kelompok di Uruguay mengorganisir upaya publik yang luar biasa dengan tujuan mencegah pelaku pelanggaran dari kalangan militer Uruguay mendapatkan kekebalan hukum.

Dengan memanfaatkan sebuah ketentuan konstitusional yang tidak pernah dipakai sebelumnya, *Comisión Nacional Pro-Referéndum*—CNR mengorganisir sebuah referendum di Uruguay, sehingga masyarakat dapat memberikan suara mengenai keputusan kongres untuk memberikan impunitas kepada pelanggar HAM yang berasal dari kalangan militer. Sebagai syarat untuk dapat mengajukan petisi kepada pemerintah agar melaksanakan referendum populer, CNR harus mengumpulkan sejumlah tanda tangan yang sangat banyak, yakni 25% dari warga negara yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan suara. Ini semua harus sudah rampung dalam tempo satu tahun sebelum hukum impunitas itu dinyatakan sah berlaku.

Mengumpulkan tanda tangan seperempat dari total jumlah penduduk menuntut organisasi yang amat besar serta keterlibatan relawan yang sangat luas, yang mayoritas berasal dari gerakan perempuan. Mengorganisir partisipan itu sendiri adalah sebuah tantangan yang signifikan. Sebagai contoh, selama sehari penuh kampanye nasional untuk mengumpulkan tanda tangan, organisator mengoordinasikan upaya sejumlah 9.000 relawan (*brigadistas*) pengumpul tanda tangan. Dalam kerja masif ini, mereka menggunakan komputer dan program pemroses *spreadsheets* untuk menabulasi tanda tangan.

Setelah seluruh tanda tangan tersebut berhasil dikumpulkan dan diajukan kepada pemerintah, CNR secara publik mempertahankan validitas mereka di hadapan komite pemeriksa pemilihan. Di sepanjang proses pengumpulan dan pengajuan tanda tangan, CNR menggunakan pengorganisasian akar rumput untuk menghadapi kecaman pedas dari kalangan pemerintah dan media. CNR mendistribusikan berbagai selebaran, menggantung bendera dan poster, serta mengorganisir aksi-aksi massa, festival musik dan bahkan maraton sepeda.

Walaupun dalam referendum CNR akhirnya kalah tipis, namun kerja keras CNR menciptakan sebuah alat baru untuk mempengaruhi arah demokratisasi di Uruguay. Dengan taktik ini, satu dari tiga orang Uruguay pernah dikunjungi secara personal

oleh para *brigadistas* selama kampanye itu. Sudah delapan referendum populer lainnya yang telah diupayakan semenjak itu. Dengan caranya sendiri *brigadistas* dan para aktivis CNR telah memainkan peran signifikan dalam perpolitikan Uruguay.

CNR tidak berhasil meraih tujuan akhirnya untuk membatalkan Undang-Undang yang memberikan impunitas, tetapi telah berhasil untuk sungguh-sungguh memobilisasi rakyat Uruguay dengan sebuah cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka juga berhasil mengangkat impunitas sebagai permasalahan nasional. Kunjungan *brigadistas* membuat begitu banyak orang tersadar—dari tangan pertama—mengenai Undang-Undang itu dan masih banyak lagi lainnya kemudian sadar mengenai isu tersebut melalui liputan media.

Ketentuan hukum seperti akses ke referendum yang tidak kerap digunakan di Uruguay, tidak selalu tersedia di setiap negara. Akan tetapi, tanda tangan masih dapat dikumpulkan untuk menggalang petisi, sebagai jalan membangun kesadaran publik serta deklarasi kepada pemerintah bahwa rakyat tidak puas terhadap kebijakan pemerintah.

Mengemban Tanggung Jawab Masa Lalu: Memobilisasi sumber daya publik bagi kelompok yang termarginalisasi secara sosial

Mengidentifikasi dan, bila mungkin, menghukum pelaku pelanggaran hanyalah sebagian dari keseimbangan. Dalam mengupayakan ganti rugi dan pemulihan atas pelanggaran HAM, beberapa kelompok mengupayakan kompensasi bagi korban, seringkali dalam bentuk perawatan, kompensasi finansial atau pengembalian properti yang disita.

Untuk bisa berhasil, kelompok-kelompok seringkali harus memaksa pemerintah yang ada saat ini untuk mengakui bagian keterlibatannya dalam pelanggaran, dan untuk mengambil tanggung jawab untuk mengkompensasi korban atau membantu mereka memperoleh perawatan.

Yayasan ICAR di Rumania menekan pemerintah untuk membantu menyediakan, pertama, bangunan fisik untuk pusat-pusat perawatan korban penyiksaan dan, kedua, hak atas pengobatan gratis dan atas jaminan asuransi untuk perawatan khusus dan pelayanan yang dibutuhkan oleh *penyintas* penyiksaan.

Taktik ICAR adalah bagian dari strategi untuk meyakinkan pemerintah untuk mengambil tanggungjawab atas masa lalu bangsa dalam upaya untuk membangun masa depan yang lebih baik. Banyak dari para penyiksa dari era komunis Rumania

melarikan diri dengan impunitas dan beberapa di antaranya sekarang menduduki posisi yang berpengaruh dalam masyarakat. Para korban menghadapi sebuah masyarakat dimana kekuatan-kekuatan yang penting lebih memilih untuk melupakan masa lalu –dan para korbannya- alih-alih untuk belajar dari masa lalu dalam upaya untuk membangun komitmen sipil yang lebih dalam kepada demokrasi dan HAM.

ICAR pertama-tama berupaya memperoleh kepercayaan dari para korban, bekerja dengan Asosiasi Rumania untuk Mantan Tahanan Politik (*Romanian Association of Former Political Prisoners*), kemudian mengidentifikasi kebutuhan kelompok yang belum terpenuhi, termasuk akses kepada perawatan kesehatan yang memadai dan dukungan finansial serta dukungan legislatif. Untuk memenuhi kebutuhan ini, ICAR menargetkan, di antaranya, pelayan sipil, profesional medis dan pejabat di badan-badan kota, kotamadya dan negara, seperti Kementerian Kesehatan, untuk menyediakan pelayanan profesional. ICAR juga menciptakan aliansi dengan organisasi masyarakat sipil kecil lainnya, media dan Dewan Rehabilitasi Internasional untuk Korban Penyiksaan atau the *International Rehabilitation Council for Torture Victims* (IRCT) di Denmark.

Dibutuhkan waktu sepuluh tahun, tetapi ICAR berhasil meyakinkan pemerintah Rumania untuk mengakui tanggungjawabnya kepada mereka yang telah menderita di tangan rezim sebelumnya.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di situs web <www.newtactics.org>, di bawah *Tools for Action*.

Keberhasilan ICAR adalah kemenangan yang sulit didapat, dan tergantung sebagian besar kepada transisi politik yang tengah dialami oleh Rumania pada saat itu. ICAR mengakui, dan menggunakan koneksinya untuk mengambil keuntungan dari, celah politis ini. Hukum yang baru dan masyarakat terbuka yang baru juga memungkinkan para korban untuk mengorganisir diri tanpa rasa takut akan tindakan pembalasan. Taktik ICAR melayani dua buah tujuan yakni untuk mengkompensasi para korban dan mengakhiri impunitas pemerintah.

*Bagaimana Anda bisa mulai melibatkan pemerintah
untuk menginvestasikan sumber daya
dalam menyediakan pelayanan kepada para korban?*

Membongkar Kedok Pelaku Pelanggaran HAM: Menyingkap pelaku pelanggaran secara publik melalui demonstrasi bersasaran

Ketika pelaku pelanggaran HAM memperoleh kekebalan hukum—apakah secara *de facto* atau dikukuhkan lewat Undang-Undang—mereka bisa saja menjalani kehidupan sebagai orang yang tidak dikenal, bahkan terkadang di tengah lingkungan yang sama dengan para korban mereka. Sebuah kelompok di Argentina berketetapan bahwa, bahkan jika para pelaku pelanggaran HAM tidak dapat diseret ke pengadilan, maka identitas mereka perlu disingkap atau “dibongkar kedoknya” di hadapan publik.

Hijos por identidad y la Justicia contra et Olvido y et Silencio— H.I.J.O.S (Kaum Muda untuk Identitas dan Keadilan Melawan Penglupaan dan Kebisuan) mengorganisir demonstrasi bertarget persis di depan rumah orang yang telah diidentifikasi sebagai pelaku pelanggaran HAM. Demonstrasi yang disebut *escraches* (“pembongkaran kedok”) ini, bertujuan menyingkap identitas pelaku pelanggaran secara publik dan memungkinkan komunitas untuk mengekspresikan penghukuman moral mereka.

H.I.J.O.S. yang mayoritas anggotanya adalah anak-anak dari mereka yang dihilangkan secara paksa, mengawali dengan mengidentifikasi individu-individu yang melakukan represi di bawah pemerintahan militer di Argentina (1976-1983). Kemudian aktivitas pra *escraches* bisa dimulai. Mereka bicara kepada perserikatan-perserikatan lokal, perpustakaan dan organisasi sosial lainnya yang bekerja di lingkungan tempat tinggal pelaku pelanggaran. H.I.J.O.S. menyebarkan berbagai pamflet dan mengorganisir ceramah informal di lingkungan dan di sekolah-sekolah. Tujuan dari pra *escrache* adalah untuk melibatkan komunitas, yang partisipasinya amat penting bagi keberhasilan taktik ini. Pada hari *escrache*, para pemrotes berkumpul di sebidang lahan atau lokasi publik lainnya, di dekat rumah orang yang menjadi target; memberikan pidato-pidato yang mengutuk individu tersebut sambil membeberkan kejahatan-kejahatannya. Mereka menempelkan ratusan pamflet di tembok disertai foto-foto, nama, alamat, nomor telepon dan biografi orang tersebut. Sejumlah aksi lain mungkin dilakukan jika tepat. Sebuah varian dari *escrache* adalah *escrache-movil*, sebuah demonstrasi yang mobilitasnya lebih tinggi, karena menargetkan lebih dari satu pelaku pelanggaran (umumnya cocok untuk menysasar para pelaku di satu lingkungan tempat tinggal).

H.I.J.O.S. memiliki perwakilan hukum untuk mendampingi dalam penyelesaian masalah apapun yang mungkin muncul dengan pihak kepolisian atau dengan kontra-

demonstrator, tetapi kunci taktik ini adalah tanpa konflik, dengan melibatkan sebanyak mungkin orang dalam demonstrasi itu.

Setelah *escrache* selesai, keefektifan dari taktik ini terletak di tangan para tetangga di lingkungan orang yang menjadi target. Kadang-kadang tanggapannya cukup mengejutkan. Ada contoh toko ditutup atau bar mendadak kosong ketika seorang pelaku pelanggaran HAM masuk. Beberapa pelaku pelanggaran yang telah menjadi target, harus pindah dari rumah mereka sendiri karena adanya penolakan sosial.

Walaupun Undang-Undang amnesti telah mempersulit sanksi terhadap para pelaku pelanggaran HAM, H.I.J.O.S. berhasil 'memotong kompas' kebekuan sistem hukum dan politik dengan mendorong sejenis sanksi berupa isolasi sosial, sambil mengemasnya dengan humor, teater dan demonstrasi kreatif lainnya.

Taktik ini memiliki beberapa resiko serius. Pihak yang mengadaptasi taktik ini harus yakin bahwa mereka menargetkan orang yang tepat dan bahwa demonstrasi itu tidak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan politis lainnya. Pihak pengorganisir demonstrasi besar di seputar subyek yang emosional harus memiliki mekanisme yang tepat untuk mencegah peristiwa itu merosot menjadi aksi kekerasan. Dalam beberapa situasi, aksi seperti ini bisa saja membuat orang-orang di lingkungan tersebut menentang para pemrotes, karena mereka mungkin tidak menginginkan gangguan seperti ini di komunitas mereka.

Bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan seluruh komunitas untuk mengutuk sebuah pelanggaran atau seorang pelaku pelanggaran HAM?

Membangun Kembali Lingkungan: Memetakan sejarah personal dan memobilisir ingatan guna mengklaim kembali sebuah situs dalam sejarah dan mendapatkan kembali lahan yang hilang

Rezim penindas sering kali memaksa rakyat untuk hengkang dari rumah mereka sendiri, merusak komunitas dan menyita tanah dan propertinya. Di era kekuasaan kolonial, kelompok masyarakat pendatang baru telah kerap kali melanggar, bahkan mencaplok batas tanah komunitas adat. Mengembalikan properti ini kepada

pemiliknya asli merupakan sebuah tantangan tersendiri dan mensyaratkan batas-batas properti ini telah diidentifikasi dan dibatasi secara positif. *District VI Museum* (Museum Distrik VI) di Afrika Selatan telah memenuhi tantangan ini dalam sebuah cara yang inovatif.

District VI Museum di Afrika Selatan memelopori aksi menuntut kembali sebuah lahan warga, sampai akhirnya mendapatkan kembali properti maupun martabat yang telah dirampas dari diri mereka di bawah kekuasaan *apartheid*. Lahan ini berlanjut menjadi sebuah situs tempat rakyat berkumpul, sambil menyebarkan dan menyegarkan ingatan mengenai lingkungan di sekitarnya, serta juga secara aktif terlibat dalam mempromosikan dialog antar warga mengenai pembangunan perkotaan yang 'lebih berwajah manusia' di Afrika Selatan.

Di tahun 1966, sebagai hasil dari *Group Areas Act* (Undang-Undang tentang Area Kelompok) lingkungan Distrik VI yang terintegrasi secara rasial di Cape Town dihancurkan rata dengan tanah untuk memungkinkan pembangunan area "hanya untuk orang kulit putih" yang baru, tetapi pembangunan ini tidak pernah terjadi. Satu-satunya bangunan yang tersisa hanyalah rumah-rumah peribadatan.

Sebagai bagian dari kampanye untuk mempertahankan tanah dan integritas komunitas, sebuah kelompok mantan warga menyelenggarakan sebuah pameran umum, dengan peta area lama sebagai instalasi utama. Instalasi ini mencakup lantai dari sebuah gereja Methodis dengan sebuah peta yang rinci dari lingkungan mereka yang telah dihancurkan, dan mengundang para tetangga mereka untuk menempatkan rumah-rumah, jalan-jalan, toko-toko dan ruang komunitas mereka di atasnya.

Project pemetaan memori ini menjadi dasar bagi klaim reklamasi tanah. Museum ini mengorganisir dan memfasilitasi salah satu Pengadilan Tanah (*Land Courts*), tempat masyarakat dapat menetapkan klaim formal atas tanah yang pernah dimiliki oleh mereka atau keluarga mereka. Para mantan warga duduk di atas kursi persis di atas peta lingkungan lama mereka, ketika pengadilan memberikan kepada mereka, dalam satu kata, "tanah kami kembali, rumah kami kembali, martabat kami kembali." Sejak itu, museum itu telah mengadakan pameran-pameran mengenai sejarah dari komunitas lingkungan berskala lebih kecil, yang telah dihancurkan di bawah Undang-Undang Area Kelompok, termasuk Kirstenboch dan Two Rivers, untuk mempublikasikan dan mendukung klaim tanah mereka yang belum terselesaikan.

District VI Museum berupaya menyediakan proses pemulihan personal dan rekonsiliasi yang berkelanjutan, serta mempromosikan kultur demokratis dan HAM yang langgeng di lingkungan tersebut. Programnya adalah untuk menjaga agar

ingatan mengenai pemindahan paksa tersebut tetap hidup dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya. Ingatan publik mengenai masa lalu, pada gilirannya memperkuat upaya-upaya untuk mencegah pemisahan (*segregation*), pemindahan (*displacement*) dan pelanggaran demokrasi lainnya di masa depan.

Dalam tahun-tahun mendatang, mantan warga Distrik VI akan mulai kembali ke lingkungan tersebut dan mendapatkan kembali tanah mereka serta membangun kembali. Belakangan, Museum Distrik VI menjadi anggota *International Coalition of Historical Sites of Conscience* (Koalisi Internasional untuk Situs Kesadaran Historis), bersama koalisi ini Museum Distrik VI dapat menyarankan cara-cara kreatif memanfaatkan sejarah dan situs-situs bersejarah, agar tetap dihidupi guna mengatasi masalah dan tantangan HAM di masa kini.

Riak di Genangan Air

Reparasi (*redress*) kerap mungkin jauh setelah pelanggaran terjadi. Komunitas masyarakat asli di Amerika Serikat dan negeri-negeri lainnya telah bekerja sekian puluh tahun untuk mendapatkan kembali hak penguasaan atas tanah adat mereka melalui pengadilan dan perjuangan di badan legislatif. *White Earth Land Recovery Project* (Project Pemulihan Tanah Bumi Putih) di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat, memutuskan untuk mengembalikan tanah dan warisan masyarakat suku Anishinaabe dengan sebuah cara lain, yakni dengan membelinya. Winona LaDuke seorang pengurus project ini berbagi kisah mengenai pemikiran strategis, fleksibilitas taktis dan pembangunan aliansi.

Ketika kami pertamakali memulai mencoba mendapatkan tanah kami kembali, kami sudah berjuang melalui tiap mekanisme hukum yang memungkinkan. Kami sudah mendatangi pengadilan, tetapi pengadilan memutuskan hal yang bertentangan dengan kepentingan kami. Kami mendatangi Kongres, tetapi mendapatkan tanggapan yang buruk. Saya sendiri sudah pernah memberi kesaksian di forum PBB. Kami telah mencoba semua mekanisme itu dan akhirnya memutuskan bahwa kami harus mencoba mencari cara lain yang lebih baik untuk mendapatkan kembali tanah kami tersebut.

Maka kami mulai mengupayakan sebuah *land trust*. Kami membeli tanah dari penjual yang bersedia menjualnya, sementara mulai ada orang yang mendonasikan tanah tersebut kepada kami juga. Hari ini kami sudah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan. Kami menanam beberapa varietas jagung lama,

beberapa buah raspberries maupun stroberi. Kami kini juga memiliki unit produksi sirup maple yang cukup besar.

Saya memikirkan perjuangan ini sebagai pengorganisir dengan memberikan contoh. Saya telah menjadi seorang organisator selama 25 tahun dan telah belajar bahwa kami bukan hanya harus memerangi apa yang salah, kami juga harus bisa menggambarkan apa yang benar. Karena orang-orang kini telah amat terbiasa dengan apa yang salah. Bahkan dalam komunitas Indian Amerika sendiri kami telah sedemikian terbiasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Dan kami telah menjadi terbiasa berpikir bahwa kami tidak akan pernah dapat memperoleh kembali tanah kami, sehingga tidak akan pernah dapat mengusahakan perekonomian kami sendiri.

Belakangan kami mulai mengubah sikap ini sedikit demi sedikit dan mendapatkan tanah kami kembali. Katakanlah jika Anda menemukan sebuah pemakaman Indian Amerika asli di suatu tempat di mana seseorang melepaskan kawanan ternak sapi di atasnya. Maka Anda perlu menyampaikan peternak itu sambil mencari cara agar pemakaman itu bisa dipagari. Ini adalah sebuah pendekatan mikro, bukan pendekatan makro. Pikirkan hal ini seperti batu kerikil kecil yang membuat riak besar di kolam.

Pada saat bersamaan ketika berurusan dengan masalah yang lebih kecil, Anda harus membuka mata kepada masalah yang lebih besar. Anda harus sangat menyesuaikan diri dengan apa yang tengah terjadi secara politis. Dan terkadang untuk memenuhi kebutuhan sebuah komunitas, Anda mungkin butuh membangun aliansi dengan orang-orang yang tak pernah Anda sangka, akan perlu diajak bekerja sama.

Sebagian dari kami yang mengadvokasi masalah-masalah hak asasi komunitas suku-suku asli di Amerika Serikat, telah menggeluti hal ini untuk jangka waktu yang cukup lama. Kami memiliki banyak pengalaman dengan analisis kebijakan nasional dan telah membangun aliansi strategis tidak hanya dengan masyarakat asli lainnya, tetapi juga dengan kalangan aktivis dan pemerhati lingkungan maupun penyedia perawatan kesehatan. Saat ini kami tengah mencoba membangun aliansi di seputar masalah makanan organik. Kami cukup beruntung kini karena telah cukup memiliki pengalaman, tetapi tidak berarti bahwa kami sudah menang. Ini hanya berarti bahwa kami telah sadar akan kondisi kami.